Edisi XI/Juni-Agustus 2014

SUARA PEMBARUAN AGRARIA

REFORMA AGRARIA YANG TERTUNDA: SATU DEKADE KRISIS AGRARIA SBY

BERITA AGRARIA

Satu Dekade Reforma Agraria era SBY
(Wawancara Achmad Yakub)

LINTAS PERISTIWA

KPA dan Alumni UGM Dorong Reforma Agraria Demi Kedaulatan Pangan

KPK akan Tindaklanjuti aduan korupsi agraria Di Karawang

Putusan Sidang Sragen Bentuk Kriminalisasi Pejuang Agraria



DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI: 3

EDITORIAL

Reforma Agraria yang Tertunda:
Satu Dekade Krisis Agraria SBY: 4



Rezim SBY dua Periode juga telah mencatatkan kiprah buruknya dalam hal penghilangan lahan subur yang semestinya diperuntukan sebagai lahan pertanian.

BERITA AGRARIA

Satu Dekade Reforma Agraria era SBY
Wawancara Eksklusif bersama Achmad Yakub
..... 15-18



Inikan sikap liberal yang sangat radikal sekali, petani disuruh bersaing dengan korporasi raksasa yang berasal dari Amerika atau Europa, dengan sistem membolehkan asing menguasai aset negara sampai 95 tahun.

DUNIA DALAM KPA: 19-27

LINTAS PERISTIWA: 28-45

DINAMIKA KEBIJAKAN AGRARIA:
KPA Evaluasi Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Penanggulangan Kemsikinan
.....48-49
Dari Festival Film Douarnenez - Perancis:
"Debat Reforma Agraria di Indonesia"
.....50-52

SOSOK:
Dianto Bachriadi



"Konsisten Memperjuangkan Reforma Agraria"
.....53-54

RESENSI:
Jaringan Rantai Kapitalisme Global:
Canggihnya Sistem Kerja Kapitalisme
.....55-56



Sumber Foto: Dokumen KPA dan media online

Buletin Suara Pembaruan Agraria diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) atasdukungan dari Ford Foundation (FF). Namun demikian buletin ini bukanlah merupakan gambaran sikap FF terhadap perwujudan agraria di Indonesia. Redaksi menerima tulisan, baik berupa liputan, opini, resensi buku. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah isi. Tulisan yang dimuat akan menjadi milik redaksi. Tulisan dapat dikirim via email : kpa@kpa.or.id atau dikirim via pos ke alamat redaksi

FORDFOUNDATION

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
KPA

Salam Reforma Agraria sejati

Pada edisi ke-11, Suara Pembaruan Agraria kali ini, redaksi akan memuat isu-isu hangat seputar perkembangan perjuangan reforma agraria di Indonesia. Editorial mengulas Satu Dekade Krisis Agraria di era SBY. Suara Pembaruan Agraria mengangkat beberapa topik aktual, dalam bentuk Opini dan wawancara eksklusif dalam rubrik Berita Agraria

Tak ketinggalan, dalam Suara Pembaruan Agraria edisi ke-XI kali ini, memuat perkembangan kegiatan organisasi KPA yang ditampilkan dalam rubrik Dunia Dalam KPA, diantaranya: Perkembangan baru NKB 12 Kementerian dan Lembaga; Peluang-peluang persiapan Reforma Agraria dalam UU Desa dan beberapa perkembangan mengenai kemajuan pendidikan reforma agraria dibeberapa wilayah basis KPA.

Pada rubrik Lintas Peristiwa menyajikan rangkaian beragam peristiwa terkini seputar persoalan agraria, antara lain Konflik Agraria Karawang, Kriminalisasi Petani Sambirejo, Sragen. Tak ketinggalan beberapa perkembangan konsolidasi gerakan agraria menyambut 54 tahun Hari Tani Nasional.

Dalam edisi ini Redaksi Suara Pembaruan Agraria juga mengulas Dinamika Kebijakan Agraria mengenai Evaluasi Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Penanggulangan Kemiskinan. Dalam rubrik Sosok, KPA mengangkat profil Dianto Bachriadi, salah seorang pendiri KPA yang saat ini menjadi komisioner Komnas HAM.

Di bagian akhir, kami juga mengangkat Resensi buku karya Bonnie Setiawan yang berjudul Jaringan Rantai Kapitalisme Global. Kami ulas dalam resensi yang menguraikan kecanggihnya Sistem Kerja Kapitalisme yang termaktub dalam buku anggota dewan pakar KPA tersebut.

Besar Harapan kami, buletin ini dapat hadir mencukupi kebutuhan akan informasi aktual dan pelajaran-pelajaran penting apa yang dapat dimaknai dari setiap kejadian. Semoga tiap rangkaian kata dapat dijadikan modal bagi perluasan kesadaran dan pengetahuan bagi pembesaran gerakan Reforma Agraria di Indonesia.

-Seknas KPA-

SUARA PEMBARUAN AGRARIA

Tiada Demokrasi Tanpa REFORMA AGRARIA

Edisi : XI / Juni - Agustus 2014

Penanggung Jawab
Iwan Nurdin

PEMIMPIN REDAKSI
Dewi Kartika

DEWAN REDAKSI
Galih Andreanto, DD. Shineba, Jarwosusilo, Andria Perangin-angin, Yusriansyah, Agus Suprayitno, Roy Silalahi, Diana, Acik, Adang Satria, Yenglis Dongche, Ruth Edri, Yogie, Danang

FOTOGRAFER
Kent Yusriansyah

LAYOUT
MPTune-desain

ALAMAT REDAKSI
Kompleks Liga Mas Indah
Jl. Pancoran Indah I
Blok E3 No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan 12760
Telp 021-7984540
Fax 021-7993834
Email : kpa@kpa.or.id





Reforma Agraria yang Tertunda:

Satu Dekade Krisis Agraria SBY

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan presiden RI pertama yang terpilih melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) langsung 2004, kemudian terpilih kembali pada Pilpres 2009. Pilpres langsung telah menempatkan visi-misi Presiden terpilih sebagai dasar rencana kerja pemerintahan. Hal ini telah merubah tradisi konstitusi kita bahwa Presiden adalah mandataris MPR yang menjalankan GBHN dan TAP MPR lainnya sebagai rencana kerja pemerintah.

Sebelum Pilpres 2004 sebagai calon Presiden, SBY memuat rencana pelaksanaan reforma agraria dalam dokumen resmi visi-misi bersama dengan kandidat wakil presiden pilihannya yaitu, M. Jusuf Kalla. Kemudian dokumen tersebut disebarluaskan dengan judul "Membangun Indonesia yang Aman, Adil dan Sejahtera: Visi, Misi dan Program Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla" pada tahun 2004.

SBY-JK dalam dokumen visi-misinya menulis dua kali reforma agraria, yaitu pada agenda program ekonomi dan kesejahteraan melalui perbaikan dan penciptaan lapangan kerja dengan mendorong pelaksanaan reforma agraria. Kemudian pada agenda program ekonomi dan kesejahteraan melalui revitalisasi pertanian dan pedesaan melalui melaksanakan reforma agraria.

Agenda ini kemudian dicantumkan secara resmi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2010 (Perpes No. 7 Tahun 2005). Selanjutnya, ia ditegaskan lagi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007). Secara kelembagaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan tugas di bidang pertanahan juga diperbarui dasar hukumnya melalui Perpres No. 10 Tahun 2006 kemudian berubah lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013.

Namun, janji pelaksanaan reforma agraria ternyata sebatas di atas kertas semata. Semasa kepemimpinannya, SBY tidak menjalankan reforma agraria sebagaimana janji politiknya, apalagi menempatkannya sebagai kerangka utama pembangunan nasional. Hal ini ditunjukan pada proses pemilihan Kabinet yang menempatkan orang-orang yang tidak mendukung reforma agraria dan mempunyai rekam jejak yang baik dalam perjuangan reforma agraria.

Tidaklah mengherankan jika kemudian kebijakan politik agraria yang dijalankan oleh SBY telah menghasilkan penyingkiran rakyat atas akses sumber kekayaan alam melalui pembenaran-pembenaran hukum. Akumulasi kelahiran produk kebijakan yang anti reforma agraria (penyingkiran rakyat atas akses sumber kekayaan alam) berdampak nyata pada kekacauan sistem hukum pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam, meningkatnya konflik agraria, hilangnya kedaulatan pangan dan kerusakan lingkungan. Berikut adalah aneka kebijakan agraria yang dilahirkan rezim SBY:

Disharmoni Undang-undang di Bidang Sumber Kekayaan Alam

Era reformasi yang membuka harapan bagi perbaikan susunan masyarakat ke arah yang lebih adil dan makmur ternyata tidak terbukti. Peralihan rezim Orde baru ke era reformasi justru makin melapangkan jalannya kebijakan sektoral yang lahir dari peraturan, tanpa berkiblat pada UUPA 1960. Rezim hasil reformasi telah alfa dalam membenahi segala peraturan sektoral terkait sumber kekayaan alam yang sebenarnya telah mendapatkan mandat dari TAP MPR IX/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembaruan Agraria. Bahkan, bukannya menjalankan amanat pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor, rezim di era reformasi melahirkan sejumlah UU yang kembali bertentangan dengan UUPA 1960, bahkan turut andil dalam semakin carut marutnya konstitusi dengan merombak UUD 1945 hingga 4 kali.

Dampak atas penyimpangan yang semakin jauh dari semangat UUPA 1960 ditorehkan oleh rezim pasca reformasi dengan melahirkan sejumlah Undang-undang yang semakin memperparah silang sengkarut kebijakan sektoral pengelolaan sumber kekayaan alam. 21 buah UU yang mengukuhkan sektoralisme dan tumpang tindih antara lain: UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU N0 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua; UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi; UU No 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah; UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah-Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (revisi tahun 2013); UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara; UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup; UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; UU No 18 Tahun 2010 tentang Sistem Budidaya Tan-

Pangan; UU No 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU No 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pidato sambutan Kepala BPN-RI pada pertemuan para pengajar dan pemerhati hukum agraria seluruh Indonesia di Universitas Trisakti, Jakarta, 4 Juli 2013 menyatakan bahwa terdapat 632 peraturan agraria yang tumpang tindih. Di sisi lain, masalah utama secara teknis implementatif adalah terjadinya tumpang tindih hukum dan peraturan. Sedikitnya terdapat 17 Undang-Undang yang tumpang tindih; 48 Peraturan Presiden; 22 Keputusan Presiden, 4 Instruksi Presiden, dan 496 Peraturan/Keputusan/Surat Edaran dan Instruksi Menteri Negara/Kepala BPN yang mengatur soal agraria. Tumpang tindih tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua hal besar, pertama tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatur sumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi. Akibatnya, terdapat berbagai macam kementerian/lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengatur pengelolaan SDA tanpa saling koordinasi bisa mengeluarkan kebijakan yang tumpang tindih terhadap sebuah lokasi. Hal ini diperburuk dengan perilaku aparat birokrasi kita yang dominan berwatak pemburu rente ekonomi.

Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual; dalam arti menyegarkan kembali vitalitas; memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain (Dokumen Pencanangan RPPK yang dibagikan panitia dalam acara Pencanangan RPPK oleh Presiden R.I. di Jatiluhur, 11 Juni 2005).

Ketidaksesuaian antara teks dengan kenyataan praktek kembali terjadi dalam lapangan kebijakan pembangunan nasional. Itulah gambaran gagalnya revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan ala SBY. Dalam rencana aksinya pemerintah berniat menyediakan 30 juta ha lahan abadi pertanian pangan dan perkebunan. Kebijakan ini justru ditunjukan kepada kontraktor dan dan bisnis pertanian berbasis korporasi. Rencananya pembukaan lahan ditunjukan bagi para petani, namun belum lagi terbagi, skema yang ditawarkan pemerintah adalah membebankan biaya pembukaan lahan, sertifikasi, produksi awal sebagian kredit mesti dilunasi petani.

Suasana pengerukan keuntungan bisnis dari praktek RPPK kian kental. Dalam suasana konversi lahan yang exstrem mencapai 100.000 Ha/tahun dan di tengah perubahan iklim, pemerintah dengan berani menaikan target produksi beras dua juta ton. Kebijakan ini hanyalah cara memperoleh pembenaran, legitimasi dan signifikasi dari publik untuk membuka keran impor bibit hibrida dan tender penunjukan langsung pengadaan bibit. Anehnya subsidi pupuk justru ditingkatkan. Alhasil pupuk bersubsidi ini mengalir ke perusahaan pertanian dan pupuk bukan langsung ke petani.

Praktek pembelian hasil panen petani yang masih didominasi oleh tengkulak dan keran impor yang dibuka lebar, menjadikan claim tingginya Harga Pembelian Petani (HPP) hanya menguntungkan tengkulak dan para pemungut pungli transportasi. Lagi-lagi petani tak mendapat keuntungan apa-apa, apalagi di tengah banjir bandang impor beras karena tuntutan pasokan membuat harga di lapangan terus merosot.

Praktek yang memarjinalkan petani kembali terjadi ketika libido pemerintah begitu tinggi menaikan produksi ethanol dan bio-fuel. Ekspansi dan perluasan lahan-lahan perkebunan sawit, tebu dan jarak dimas-

ifkan. Namun lagi-lagi petani hanya ditempatkan sebatas buruh perkebunan perusahaan ini.

Kenyataan miris kondisi pertanian nasional kian nyata. Petani ditempatkan sebagai objek kebijakan pembangunan, penumpang dalam korporasi dan terjebak dalam lingkar kemiskinan pedesaan. Petani dengan mudah beralih profesi dan melepas tanahnya karena identiknya pertanian dan kemiskinan. kini persoalan lanjutan muncul, regenerasi petani terancam putus, dengan Jumlah rumah tangga menurut petani utama yang berusia di atas 54 tahun relatif besar, yaitu 8,56 juta rumah tangga (32,76 persen). Jika ada petani yang masih bertahan, mereka hidup dalam tekanan dan guncangan, lantas semakin lengkap dan nyatalah krisis pertanian Indonesia di masa depan.

Ketimpangan

Sulit ditolak bahwa dalam satu dekade terakhir keruwetan agraria disumbang oleh obral izin eksploitasi sumber agraria. Di sektor kehutanan misalnya, Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, luas kawasan hutan dan perairan Indonesia sampai dengan tahun 2013 adalah 131.156.904,97 ha.

Kemenhut telah mengeluarkan sebanyak 331 unit izin HTI (SK Definitif, SK Sementara, Total Pencadangan) dengan luas areal 13.411.012 juta hektar. Bandingkan dengan Izin bagi Hutan Tanaman Rakyat melalui (IUPHHK-HTR) yang hanya seluas 188.573 Ha dengan jumlah pemegang izin sebanyak 6.413 unit. Yang lebih gawat lagi adalah besaran luasan HPH atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH) hingga 2013 di Indonesia yang mencapai 20.889.673 Ha.

Di sektor perkebunan setidaknya sudah 13,5 Hektar telah dikuasai perkebunan kelapa sawit (Sawit Watch 2013). Luas areal perkebunan kelapa sawit di indonesia selama tujuh tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 2,49 s.d. 11,33% per tahun. Dari luasan itu sebagian besar dikuasai oleh segelintir kelompok korporasi besar saja. Bayangkan total kelapa sawit daerah dikendalikan oleh taipan yang menguasai hingga 5.1 juta ha dengan 3.1 juta ha ditanam (60 %) dan 2.1 juta ha belum ditanami (40 %). Dengan rata-rata penguasaan seluas 204,000 ha per kelompok dengan 18 kelompok lebih dari 100 ribu ha (Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo. 2014)

Hal serupa terjadi pada sektor pertambangan, 64,2 juta hektar tanah (33,7% daratan) telah diberikan izin kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Angka ini belum termasuk luas konsesi pertambangan minyak dan gas. Luasan total lahan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 41,750,107 Ha, Kontrak Karya (KK) total luasan 22,764,619.07 Ha dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seluas 7,908,807.80 Ha.

Problem struktural inilah yang sebenarnya menjadi sumber masalah agraria di Indonesia. Namun problem substansial ini tidak menjadi kebijakan prioritas rezim SBY untuk dibereskan. Ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan lahan (red: tanah) menjadi akar dari berbagai persoalan yang berakibat pada guremisasi petani, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Semakin tinggi gini ratio maka kesenjangan antara penduduk miskin, menengah dan menengah atas semakin tinggi. Semakin timpang pendapatan masyarakat akan berpotensi pada kerawanan sosial di masa mendatang. sisi lai ekonomi Indonesia adalah orang kaya yang bertambah kaya. Credit Suisse melaporkan, pertumbuhan jumlah orang kaya di Indonesia tercepat di dunia dengan peningkatan 5 kali lipat dalam satu dekade. Perkumpulan Prakarsa menghitung, pada 2008 akumulasi kekayaan 40 orang terkaya setara dengan 30 juta penduduk, lalu

pada 2011 melonjak setara dengan kepemilikan 77 Juta Penduduk. Jumlah total tabungan di Perbankan kini mencapai lebih dari Rp. 3500 Triliun. Namun kurang dari 0,6 persen pemilik rekening menguasai lebih dari 70% tabungan atau sekitar Rp. 2.500 Triliun (Budiantoro, Kompas: 2014). Kesenjangan di Indonesia kian parah dan menginjak angka 0.413 pada 2013.

Konflik Agraria

Sepanjang kekuasaan SBY sejak tahun 2004 hingga pertengahan 2014, telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektar, dimana ada lebih dari 926.700 KK harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik dan sengketa agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengakibatkan 1.354 orang ditahan, 553 mengalami luka-luka, 110 tertembak peluru aparat, serta tewasnya 70 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut.

Masalah sektoralisme kebijakan dan kelembagaan dalam hal pengelolaan sumber-sumber agraria menjadi penyumbang konflik-konflik yang terjadi. Berdasarkan sektor, maka konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sebanyak 536 konflik, bidang infrastruktur 515 konflik, sektor kehutanan. 140 konflik, sektor tambang 90 konflik, sektor pertanian 23 konflik, pesisir-kelautan 6 konflik dan lain-lain.

Tanda Tak Berdaulat: Impor Pangan Membengkak

Maksud swasembada yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintahan rezim

Tanda Tak Berdaulat: Impor Pangan Membengkak

Maksud swasembada yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintahan rezim SBY ternyata hanya ilusi. Tanpa melahirkan prasyarat dan bahkan cenderung melahirkan kebijakan yang memapankan hancurnya pertanian, rezim SBY telah berhasil menempatkan Indonesia sebagai pengimpor bahan pangan terbesar di dunia. Sejak masa pemerintahan SBY tahun 2004 hingga 2009 saja, impor pangan Indonesia terus meningkat. Paling tidak, 16 komponen pangan utama mengalami peningkatan impor antara 35% hingga 331%, dengan rata-rata 118,3% dalam kurun waktu lima tahun. Impor terbesar adalah buah-buahan dan sayur-sayuran (US$ 584,079 juta), gandum dan olahan gandum (US$ 556,911 juta), gula, olahan gula, dan madu (US$ 372,956 juta), binatang hidup (US$ 312,256 juta), serta daging dan olahan daging (US$ 217,477 juta).

Alih-alih membangun pertanian dalam negeri justru hampir semua bahan pangan dibiarkan kran impornya terbuka, beberapa bahkan dengan bea masuk 0%. Nilai impor tanaman pangan dalam kurun 2009-2011 saja sudah menembus 13 miliar USD. Sepanjang tahun 2012 saja, impor produk pangan Indonesia telah menyedot anggaran lebih dari Rp 125 triliyun. Dana tersebut digunakan untuk impor daging sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam, kentang, dan komoditas pangan lain yang pada akhirnya hanya semakin mematikan pertanian indonesia. Kebijakan SBY telah nyata semakin memiskinkan petani dengan perlindungan yang setengah hati terhadap gempuran pasar bebas dengan serbuan impor bahan pangan.

Komoditas padi menjadi ukuran utama swasembada pangan, karena merupakan bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut BPS dan Kementerian Pertanian 2013 dalam dokumen studi pendahuluan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang

Pangan dan Pertanian 2015-2019 yang dikeluarkan oleh Bappenas Volume impor beras meningkat rata-rata 61,85% per tahun selama 2008-2012. Secara statistik, defisit perdagangan beras meningkat sangat cepat yaitu rata-rata 62,%/tahun untuk nilai absolut dan 56.6% untuk angka relatif selama 2008-2012. Pada 2011 Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia dengan pangsa 8,19 %.

Menurut Bappenas, konsumsi jagung pada 2012 mencapai 20 juta ton dan impor mencapai 1.89 juta ton. Secara statistik terjadi peningkatan defisit perdagangan jagung sangat cepat yaitu rata-rata 69,68%/ tahun selama 2008-2012.

Dari dokumen Bappenas 2013, terungkap bahwa produksi kedelai nasional selama 2009-2012 terus menurun. Akibatnya terjadi defisit yang terus meningkat sangat cepat dengan rata-rata 20,38%/tahun selama 2008-2012. Pada tahun 2012, produksi dalam negeri hanya mampu menyediakan 29% dari konsumsi total. Indonesia menempati urutan ke-8 dengan pangsa impor 2,03% pada tahun 2011. Diproyeksikan defisit kedelai pada 2015 hingga 2020 mencapai 1,85-2,22 juta ton.

Komoditas gula pada 2012 terjadi defisit pada tahun 2012 mencapai 2,73 juta ton (105,1% dari produksi), jauh diatas defisit pada tahun 2008 yang hanya 0,85 juta ton (32% dari produksi). Rata-rata produksi gula menurun 6,36% pertahun sehingga pada 2012 ada impor 0,49 juta ton. Pada tahun 2015 defisit gula nasional akan berkisar antara 2-3 juta ton (Bappenas 2013).

Realisasi produksi daging sapi lokal pada 2012 hanya mencapai 0,4 juta ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi pada 2012 mencapai 0,54 juta ton sehingga ada defisit sebesar 119.401 ton atau 28%. Pada 2012 Indonesia impor daging sapi sebesar 58.752 ton. Diperkirakan pada 2015 produksi daging sapi dan kerbau nasional akan mencapai 407,3 ribu ton. Pada tahun-tahun berikutnya bahkan sampai akhir 2019 defisit daging akan mencapai sekitar 362,6 ribu ton. (Bappenas 2013)

Kehilangan Lahan Pertanian

Rezim SBY dua Periode juga telah mencatatkan kiprah buruknya dalam hal penghilangan lahan subur yang semestinya diperuntukan sebagai lahan pertanian. Hilangnya kemampuan bangsa sebagai penghasil makanan yang berasal dari tanah-airnya sendiri semakin menjadi-jadi. Dalam Rentang 1992–2002, laju tahunan konversi lahan baru 110.000 ha, dan periode 2002– 2006 melonjak jadi 145.000 ha per tahun. Rentang 2007–2010, di Jawa saja laju konversi rata-rata 200.000 ha per tahun (Kompas, 24/5/2011).

UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diklaim sebagai upaya revitasisasi pertanian ternyata tidak berpengaruh positif terhadap laju konversi lahan yang kian meninggi. Tanpa upaya serius dari pemerintah, dapat dipastikan, kurang dari 20 tahun ke depan tak akan ada lagi lahan sawah di negeri ini. Sekedar mengingatkan, luas lahan sawah saat ini tinggal 7,5 juta ha (ditambah 9,7 juta hektar lahan kering). Celakanya, sekitar 80 persen konversi lahan sawah terjadi di wilayah sentra produksi pangan nasional: Pulau Jawa. Data hasil audit lahan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dan BPS mengungkap fakta, sepanjang tahun 2008 hingga 2010 laju konversi lahan sawah di Pulau Jawa sebesar 600.000 ha atau secara rata-rata mencapai 200.000 ha per tahun.

Nilai Tukar Petani (NTP) Merosot

BPS pada awal Maret 2014 mengungkapkan Nilai Tukar Petani (NTP) Februari turun 0,16 menjadi 101,79. NTP Januari sendiri turun tipis 0,01 dari capaian Desember 101,96. Adapun, NTP sepanjang 2013 tercatat 99,72 mencapai nilai terendah sejak 1996. Sejak 2004 hingga

2013 NTP terus merosot.

Menurunnya NTP mendorong tingkat kemiskinan pedesaan, dan akan menggeser warga hampir miskin menjadi warga miskin. Survei kemiskinan terkini BPS September 2013 menunjukan jumlah orang miskin naik 0,48 juta menjadi 28,59 juta. Tingkat kemiskinan kian parah karena indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,75% per Maret menjadi 1,89%. Indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43% per Maret jadi 0,48%.

Kemiskinan

Menurut BPS, Pada 2009 penduduk miskin telah turun sebesar 2,43 juta jiwa, meski begitu jumlah penduduk miskin kita masih sangat besar yakni 32,5 juta jiwa atau 14,2 persen dari jumlah penduduk. Padahal angka ini diperoleh dengan menghitung basis konsumsi US$.1 perhari. Tentu jika menggunakan parameter US$.2 angka tersebut akan membengkak luarbiasa.

Angka-angka tersebut menandakan bahwa selama ini pemerintah gagal mengenal siapa kaum miskin itu sesungguhnya. Sampai sakarang, besar orang miskin bertempat menetap di pedesaan dan mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dari total 28 juta Rumah Tangga Petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat 6.1 juta RTP di pulau Jawa yang tidak memiliki lahan sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa. Sedangkan bagi mereka yang memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar. Jadi dengan kata lain saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten. Mereka, sampai sekarang belum pernah mendapatkan program nyata yang tepat dari pemerintah untuk menyelesaikan problem utama yang dihadapi mereka yaitu ketiadaan lahan.

Pada 2010 Bappenas mengklaim bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif sudah lebih baik. Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengeluarkan angka pertumbuhan 5,8%. BPS juga menghitung jumlah pengangguran turun lagi dari 7,4% menjadi 7,1% dari total jumlah penduduk, dan 2011 diprediksi angka pengangguran turun menjadi 7%. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor RI pada Oktober 2010 tembus US$ 14,22 miliar atau naik 16,14% dibanding kan dengan periode yang sama tahun 2009. Secara kumulatif nilai ekspor Januari-Oktober 2010 mencapai US$ 125,13 miliar, atau naik 35,45% dibanding periode sama 2009. Menurut BPS, penduduk miskin telah turun menjadi sekitar 13,1% dari 14,2% pada tahun 2009.

Masalahnya angka pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan serta pengangguran dihitung berdasarkan basis ekspor import dan kenaikan investasi, yang hanya didominasi oleh sekitar 10% penduduk. Jika kita telaah dari angka kemiskinan rumah tangga di pedesaan, sampai sekarang, besar orang miskin bertempat menetap di pedesaan dan mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dari total 28 juta Rumah Tangga Petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat 6.1 juta RTP di pulau Jawa yang tidak memiliki lahan sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa. Sedangkan bagi mereka yang memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar. Jadi dengan kata lain saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten.

Maka angka pertumbuhan dan penurunan yang dikeluarkan oleh rezim menjadi tidak berguna dan menimbulkan implikasi akan semakin ditinggalkannya kebijakan pro rakyat. Seharusnya rezim melakukan analisa berdasarkan basis pemerataan pembangunan dan perhitungan akses terhadap sumber daya. Karena jika dihitung berdasarkan akses terhadap sumber daya, dapat dipastikan bahwa 60% lebih rakyat berada dalam angka yang rawan terhadap kemiskinan dan pengangguran.

PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) dan Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Pertanahan)

BPN sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mengurusi pertanahan menggulirkan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Di dalam perjalanannya PPAN justru menyimpang dari tujuan awalnya atau bertolak belakang dari pelaksanaan amanat reforma agraria sejati. Bahkan PPAN berujung pada program layanan sertifikasi tanah. Pensertifikasian tanah di atas berlakunya ketimpangan penguasaan struktur agraria membuktikan bahwa PPAN ternyata adalah pembaruan agraria pro-pasar.

Pada masa kampanye Pilpres 2009, SBY mengklaim bahwa pembaruan agraria telah dijalankan pemerintahnya melalui berbagai iklan di media massa semasa pilpres. Program tersebut, adalah Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Ini adalah sebuah klaim yang menyesatkan. Sepanjang 2009, tidak ada UU ataupun Kebijakan Operasional yang ditandatangani oleh SBY yang berisi tentang pelaksanaan Reforma Agraria.

Harus diakui pemerintahan memang mencantumkan Pembaruan Agraria sebagai salah satu program pemerintahannya. Bahkan, wacana yang digulirkan oleh Presiden tentang program ini telah dilakukan sejak awal tahun 2007 tentang rencana melakukan redistribusi tanah seluas 8.1 juta hektar kepada rakyat miskin. Namun, rencana tersebut sampai sekarang masih sebatas wacana politik yang belum melangkah ketingkat implementasi.

Ketika Pemilihan Presiden 2009 usai, dan kembali SBY terpilih sebagai Presiden, langkah awal Presiden tidak menggambarkan keinginan untuk menjalankan Reforma Agraria. Tidak ada satu kalimatpun yang keluar dari SBY tentang komitmen untuk menjalankan Reforma Agraria. Yang terjadi, SBY dan Kabinet terpilih menyelenggarakan National Summit dan menetapkan agenda 100 hari kerja pemerintahan adalah menyediakan lahan untuk kepentingan infrastruktur dan investasi, tanpa sekalipun menyebut PPAN sebagai langkah penyediaan tanah bagi rakyat miskin.

Larasita adalah turunan PPAN. Terkait Program layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Pertanahan (larasita) yang diklaim sebagai pionir dunia. Klaim ini sungguh mengusik karena yang seungguhnya teriadi adalah; BPN telah menjadikan Indonesia sebagai negara pionir di dunia yang menjalankan praktek pertanahan seperti Yang disarankan oleh Bank Dunia. Program ini semata bertujuan mewujudkan pasar tanah bebas di Indonesia sesuai dengan poyek Hutang Land Administration Project (LAP) dan Land Managenent and Policy Development Project (LMPD) yang telah dijalankan sejak tahun 2005-2009.

Kenyataannya, program ini telah menyeret petani yang bertanah kecil semakin cepat kehilangan tanahnya, karena tanah tersebut semakin mudah dijual atau diagunkan kepada perbankan. Dalam keadaan bertanah sempit dan situasi makro ekonomi yang tidak berpihak kepada petani, maka sertifikasi pertanahan yang disebut Larasitia, tanpa didahului oleh Reforma Agraria adalah alat sistematis yang justru menjerumuskan tanah petani semakin cepat terjual dan jatuh kepada pemodal besar, sehingga ketimpangan tanah pun semakin. Lebar. Itulah sebabnya tanah pertanian sekarang ini banyak dimiliki oleh kelompok non-petani yang tinggal di kota, sementara petani gurem telah meniadi buruh tani.

Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Pertanahan (Larasita) ini sering diklaim oleh BPN diklaim sebagai pionir dunia. Oleh sebab itu Kepala BPN mengakui di depan DPR-RI telah mendapat penghargaan dari Bank Dunia karena program ini. BPN kerap memberi penjelasan bahwa LARASITA adalah mobile office atau kantor bergerak yang melayani sertifikasi pertanahan rakyat. Menurut BPN, latar

belakang program ini disebabkan unit terendah kantor pertanahan hanya terdapat di ibukota kabupaten. Sementara, sebagian besar rakyat tinggal di pedesaan. Sehingga, dengan terobosan ini mayoritas rakyat dapat terlayani dalam program sertifikasi pertanahan. Sebab, dengan mobile office petugas BPN dapat melayani rakyat hingga ke pelosok dengan mobil atau sepeda motor program Larasita. Setelah setahun berjalan, kritik KPA kepada BPN soal program ini terbukti kebenarannya.

Pertama, mayoritas rakyat memang berada di pedesaan, oleh sebab itu yang diperlukan oleh adalah koordinasi BPN dengan pemerintah daerah yang mempunyai tangan hingga ke pemerintah desa bahkan RT. Jadi program ini sesungguhnya boros mulai dari pengadaan, operasional hingga efektifitas sasaran.

Kedua, jika kita membaca Peraturan Kepala BPN tentang Larasita, program ini juga ditujukan untuk menemukan objek reforma agraria pada saat petugas BPN turun ke desa-desa. Ini juga dapat dipastikan mustahil tercapai, sebab jika itu sasaran pekerjaannya (baca: menemukan objek RA) bukanlah sertifikasi tanah, tetapi melakukan registrasi tanah-tanah khususnya di pedesaan. BPN bisa merujuk pada jiwa PP No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah. Registrasi dalam PP ini bukanlah sertifikasi, sehingga melalui proses registrasi akan ditemukan ketimpangan struktur agraria di desa sekaligus tanah objek land reform.

Ketiga, sertifikasi pada struktur agraria yang timpang (kepemilikan, penguasaan dan tataguna tanah) justru akan melegalkan struktur yang timpang tersebut. Keempat, ini adalah program yang menjadi fondasi utama pasar tanah liberal, dan tentusaja sangat bertentangan dengan UUPA 1960.

Menurut KPA, penghargaan Bank Dunia kepada BPN soal Larasita adalah sinyelemen yang jelas bahwa BPN telah menjalankan praktek administrasi pertanahan seperti yang disarankan oleh Bank Dunia. Program ini semata bertujuan mewujudkan pasar tanah bebas di Indonesia sesuai dengan proyek hutang Land Administration Project (LAP) dan Land Management and Policy Development Project (LMPDP) yang telah dijalankan sejak tahun 2005 – 2009.

Kenyataannya, program ini telah menyeret petani yang bertanah kecil semakin cepat kehilangan tanahnya, karena tanah tersebut semakin mudah dijual atau diagunkan kepada perbankan. Dalam keadaan bertanah sempit dan situasi makro ekonomi yang tidak berpihak kepada petani, maka sertifikasi pertanahan –sebut Larasita, tanpa didahului oleh Pembaruan Agraria adalah alat sistematis yang justru menjerumuskan tanah petani semakin cepat terjual dan jatuh kepada pemodal besar, sehingga ketimpangan tanah pun semakin lebar. Itulah sebabnya tanah pertanian sekarang ini semakin banyak dimiliki oleh kelompok non petani yang tinggal di kota, sementara petani gurem telah menjadi buruh tani.

MP3EI Bertentangan dengan Reforma Agraria

Warisan liberalisasi penuh dalam konteks agraria ditorehkan SBY dalam bentuk proyek raksasa bernama MP3EI. Selain itu rancang bangun yang lengkap berupa aneka kesepakatan yang dilaksanakan rezim sebelumya seperti AFTA, APEC dan WTO serta perjanjian internasional lain yang menyandera semangat reforma agraria.

Pendapat umun yang berlaku bahwa Jokowi-JK tak mungkin mengoreksi arah liberalisasi agraria tak sepenuhnya salah. Namun, masih terlalu dini menilai apakah arah kebijakan yang bertentangan dengan arah dan coraknya reforma agraria akan dikoreksi atau justru diteruskan.

Seperti yang telah dibicarakan dalam diskusi-diskusi masalah agraria dan perkembangan gerakannya, bahwa tekanan bagi pemerintahan baru ada pada gempuran

modal korporasi swasta baik domestik, asing maupun yang dimiliki negara yang akan menyetir arah politik agraria nasional.

Dalam konteks global, Indonesia ditempatkan sebagai penyangga krisis finansial dimana akumulasi modal yang mandeg harus dialirkan lebih luas lagi termasuk melalui pembaruan geografi ekonomi ke negara berkembang. Seperti yang telah dikatahui bahwa investasi ke depan akan diarahkan besar-besaran ke arah pembangunan infrastruktur dalam tahapan pengerukan sumber daya alam. Investasi diarahkan dari hanya uang atau sekadar saham ke arah bisnis infrastruktur.

Bisnis infrastruktur dipandang oleh investor global dari segi jangka panjang waktu yang memberikan keuntungan tinggi dan mampu diprediksi. Jadi saat ini ketersediaan suplai uang sangat melimpah dan siap untuk membiayai bisnis infrastruktur. Bagi kapitalisme global masalah utama bisnis infrastruktur adalah bagaimana penyesuaian regulasi sebuah negara dapat bersaing mendapatkan suplai kapital dan menurunkan potensi-potensi resiko. Dengan alasan percepatan pembangunan ekonomi, Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya kepada Investor untuk menggunakan sumber daya yang ada di Indonesia. hampir seluruh wilayah hidup dijadikan komoditi, karena memang sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah dengan sumberdaya alam yang melimpah.

Geografi ekonomi baru yang diadopsi oleh MP3EI yang merupakan bagian dari upaya untuk memperdalam integrasi tanah-air Indonesia ke zona perdagangan bebas ASEAN dan Asia Timur. Pokok agendanya adalah reorganisasi ruang dalam rangka memperlancar interaksi dan aliran kapital, barang dan tenaga kerja untuk aktivitas produksi dan konsumsi. Kerangka berpikir geografi ekonomi baru ini digunakan oleh World Bank dalam World Development Report pada tahun 2009 yang menghasilkan sebuah ide dengan mengusung Reshaping Economic Geography, mendorong aglomerasi dan mengarahkan bisnisnya ke Asia Timur atau dengan kata lain, Asia Timur dijadikan sebagai tempat mengelompokan usaha-usaha industri atau kawasan industri. Asia menjadi pusat produksi dunia sejak 2011.

Badan riset ASEAN dan Asia Timur yang bernama ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) merupakan "Ibu" dari MP3EI. ERIA berkantor di Sekretariat ASEAN, jalan Sisingamangaraja, Jakarta. Negara pemrakarsa ERIA ternyata adalah Jepang. ERIA pada tahun 2010 menghasilkan CADP (Comprehensive Asia Development Plan/Design Induk Pembangunan Asia) dan Master Plan on Asean Conectivity (MPAE) untuk kerangka inisiatif pembangunan infrastruktur. Lanjutannya, pada tahun 2011 ERIA melakukan penelitian yang menghasilkan Indonesia Economic Development Corridors (IEDCs), hasilnya kemudian diadaptasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian menjadi MP3EI.

ERIA mendorong pembentukan koridor-koridor ekonomi seperti, GMS (Great Mekong Subregion: Cina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand); IMT: Indonesia, Malaysia, Thailand dan BIMP: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina. ERIA berambisi membuat suatu model yang berisi jaringan-jaringan produksi tingkat regional yang menghubungkan pabruk-pabrik di berbagai wilayah ekonomi Asia yang memproduksi bagian-bagian dan komponen-komponen yang kemudian dirakit, dan produk akhirnya dikirim ke wilayah-wilayah "ekonomi maju." Jaringan-jaringan tersebut merupakan bagian dari rantai produksi komoditas di tingkat regional dan global.

Petik Pelajaran

Kesalahan yang dibuat oleh rezim yang lalu dapat dijadikan pelajaran bagi rezim yang baru. Pemahaman tentang apa yang terjadi di

masa lalu dan merangkainya dengan kenyataan masa kini, sehingga teridentifikasi hubungan sebab-akibatnya. Dengan bekal pemahaman ini, tentu kita dapat berusaha mengantisipasi kenyataan masa depan. Suatu kenyataan saat ini seperti yang diuraikan di atas merupakan sebuah proses berkesinambungan.

Memang tidak salah, jika banyak masyarakat menganggap bahwa tahun 2014 merupakan tahun penentuan karena terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Momentum ini mengandung peluang dan harapan. Namun, pimpinan nasional wajib mampu dan sanggup melakukan langkah terobosan yang mendasar, khususnya dalam hal koreksi arah Idiologi liberal yang tercermin dari kebijakan yang mendasari pengurusan sumber agraria. Hambatan akan selalu ada, karena Indonesia sudah terlanjur menjeratkan diri dalam perutnya gurita kepentingan global melalui keterikatan dengan perjanjian internasional dan mengintegrasikannya dengan regulasi dan kebijakan nasional.

Pemimpin baru harus mengoreksi besar-besaran segala kebijakan, regulasi dan konsesi yang berkiblat pada liberalisme penuh ke arah program yang sesuai dengan tujuan nasional yaitu reforma agraria. Penanda itikad pemerintahan baru untuk menjalankan agenda reforma agraria setidaknya dapat dilihat dari beberapa peristiwa penting nantinya. Penanda pertama adalah, pemilihan Menteri dalam kabinet baru. Politik Kabinet harus terarah pada orientasi pelaksanaan reforma agraria. Ide dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru harus disinkronkan dalam wadah arsitektur kabinet.

Pertanyaan kunci bagi pemerintahan baru, apakah akan meneruskan penyimpangan politik agraria nasional ke arah liberalisme atau mengembalikannya ke arah cita-cita kemerdekaan nasional yaitu terbentuknya tatanan masyarakat adil dan makmur?

Pemerintahan baru harus dapat memberi garansi akan terlaksananya keadilan agraria bagi rakyat. Membereskan krisis agraria dengan memprioritaskan keberpihakannya bagi rakyat tak bertanah sangat mendesak untuk segera dituntaskan. Jangan sampai pemerintahan baru hanya memfasilitasi korporasi perampas tanah rakyat melalui pendekatan-pendekatan pertumbuhan ekonomi, deregulasi, melayani modal dan pembangunan yang menyingkirkan rakyat.

Melihat uraian-uraian di atas, untuk menjaga agar politik rakyat tidak dimarjinalkan. Maka, rakyat harus memposisikan sebagai penentu nasib dan cita-citanya sendiri. Dalam konteks gerakan agraria, kita memiliki tugas besar di lapangan agraria dengan meningkatkan dan memperluas derajad kesadaran dan pemahaman reforma agraria ke rakyat banyak.

Janji Pemerintahan baru jangan dijadikan obat penenang. Justru gerakan agraria harus berani meneguhkan sikapnya takkala pemerintahan baru nanti melenceng dari janjinya atau justru melahirkan kebijakan yang anti reforma agraria. Gerakan agraria harus semakin memantapkan konsolidasi, membangun solidaritas persatuan antar sektor rakyat. Di tataran lapangan, gerakan agraria wajib meluaskan areal perjuangannya dan memasifkan pendidikan-pendidikan dalam rangka menggiatkan dan mempercepat pelaksanaan reforma agraria inisiatif rakyat. itu semua demi terus hidup dan berkembang luasnya langgam gerakan reforma agraria. Agar suatu saat kuasa politik benar-benar di tangan kita.

(Seknas KPA)

Satu Dekade Reforma Agraria Era SBY

Wawancara Exclusive Bersama Achmad Yakub



Achmad Yakub adalah tokoh muda yang selalu optimis bahwa kehidupan petani akan menjadi lebih baik jika sumber agraria dikelola secara adil. Menurut Achmad Yakub, yang sekarang aktif di Bina Desa, salah satu penyebab tidak dijalankannya reforma agraria sejati di Indonesia adalah besarnya investasi yang lapar tanah ke Indonesia.

Di zaman SBY berbagai UU dan kebijakan yang dikeluarkan bersifat liberal dan bertentangan dengan semangat UUPA 1960. Akhirnya segala kekayaan alam Indonesia hanya dikuasai segelintir orang sehingga hak rakyat atas tanah dan ruang hidup semakin tidak terjamin.

Tim KPA berkesempatan mewawancarai Achmad Yakub secara eksklusif untuk membaha dinamika reforma agraria selama satu dekade, berikut hasil wawancaranya:

Bagaimana kondisi agraria selama satu dekade Pemerintahan SBY?

Kondisi 2004, pada zaman SBY, bukanlah murni kondisi yang diciptakan oleh SBY semata, tetapi kondisi ini lahir semenjak era kolonial. Kalau kita ingin melihat kondisi agraria selama SBY berkuasa (2004-2014) maka kita harus melihat perjalanan agraria mulai zaman kolonial Belanda yang melahirkan agrarische wet 1870, upaya Soekarno yang ingin merubah struktur kepemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria dengan melahirkan UUPA 1960, kemudian zaman Soeharto yang membuka kran penanaman modal dengan cara membedakan penanaman asing dan dalam negeri, sampai zaman reformasi yang dipimpin oleh B.J Habiebie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY.

Apa yang terjadi dengan segudang masalah agraria di Indonesia memang disebabkan oleh belum tuntasnya revolusi sosial di zaman kemerdekaan. Upaya Soekarno untuk melakukan perubahan sosial dengan mengubah kepemilikan dan pengelolaan sumber agraria tidak maksimal karena banyaknya ganguan dari dalam dan luar negeri. Pada saat itu terjadi agresi militer Belanda I dan II serta pemberontakan yang didalangi oleh DII/TII, Permesta dan PRRI. Soekarno berhasil menjalankan landreform di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera.

Setelah terjadi perpindahan kekuasaan yang kemudian menjadikan Soeharto sebagai presiden akibat dari kondisi politik "tak menentu" maka sejak saat inilah kondisi agraria semakin jauh dari semangat

UUPA 1960. Presiden SBY memang tidak memiliki kemauan secara politik untuk menjalankan reforma agraria. Ini bisa dibuktikan dari penandatanganan infrastructure summit (IS) yang melahirkan investasi lapar tanah. Akhirnya SBY membuka kawasan-kawasan ekonomi Khusus dengan membagi enam (6) koridor. Contohnya yang ada di Riau, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan tempat lainnya.

Kemudian dilanjutkan dengan keinginan SBY untuk memenuhi pasar Europa, yaitu kebutuhan bahan dasar biofuel. Akhirnya terjadi ekspansi sawit secara besar-besaran yang membuat hak kelola rakyat semakin sempit, kerusakan hutan semakin cepat dan rusaknya lingkungan hidup flora dan fauna.

Jadi saya menyimpulkan SBY adalah bagian dari perkembangan ekonomi liberal yang memfasilitasi multi pihak, baik itu perusahaan swasta dan negara serta rakyat. Namun dalam perjalanannya memang Pemerintahan SBY selalu mengorbankan rakyat ketimbang melindungi hak-hak rakyat atas ruang untuk hidup.

Siapakah orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan konflik agraria selama satu dekade?

Orang yang paling bertanggung jawab adalah presiden karena mandat konstitusi negara. Di dalam UUD 1945 sudah jelas dikatakan bahwa cita-cita kemerdekaan dan proklamasi adalah mewujudkan keadilan sosial, menyejahterakan dan memakmurkan kehidupan rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Cara mencapai semua ini adalah dengan membangun satu sistem penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria secara adil.

Namun dikarenakan paradigma ekonomi pembangunan nasional SBY menganut ekonomi liberal maka dia bertentangan dengan konstitusi. Contohnya, SBY melanjutkan keinginan Soeharto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara penganut ekonomi liberal dengan mengeluarkan UU tentang Penanaman modal. UU ini menyatukan investasi asing dan dalam negeri serta memperpanjang masa kontrak sampai 95 tahun.

Inikan sikap liberal yang sangat radikal sekali, petani disuruh bersaing dengan korporasi raksasa yang berasal dari Amerika atau Europa, dengan sistem membolehkan asing menguasai aset negara sampai 95 tahun. Selain itu, UU Penanaman Modal ini juga tidak lagi membedakan kepentingan publik dengan kepentingan privat, semua telah disamakan.

Sikap SBY yang pro terhadap investasi lapar akan tanah telah menyebabkan berbagai konflik kekerasan sampai menelan korban jiwa, perampasan tanah dan kriminalisasi. Jadi dikarenakan SBY terpilih sebagai presiden dalam kurun waktu satu (1) dekade maka dialah paling bertanggung jawab atas semua yang terjadi mengenai konflik agraria. Akan tetapi presiden selanjutnya tidak boleh mengulangi kesalahan SBY sehingga dia wajib menjalankan reforma agraria dan menyelesaikan konfliknya.

Apa saja kebijakan dan UU yang merugikan rakyat petani semasa SBY Berkuasa?

Memang selama ini yang menjadi perdebatan hangat adalah mengenai pengorganisasian rakyat dengan perjuangan legal-formal. Dalam perjalanannya perjuangan legal-formal lebih cepat dibandingkan dengan penguatan organisasi rakyat karena tugasnya jauh lebih berat.

Saya sudah sering katakan kepada teman-teman bahwa yang kita perlukan bukan pembaruan hukum agraria, tetapi kita lebih membutuhkan naskah-naskah legal yang dikeluarkan negara sebagai panduan pokok dalam rangka menjalankan pembaruan agraria. Faktanya negara tidak mengeluarkan naskah untuk mewujudkan terlaksananya reforma agraria, tetapi negara malah mengeluarkan berbagai UU sektoral yang mengkebiri hak rakyat. Misalnya UU Perkebunan,

UU Pertambangan, UU Penanaman Modal, UU Pengadaan Tanah, UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan seterusnya.

Saya coba jelaskan beberapa UU yang berdampak buruk terhadap petani, UU Perkebunan dan Kehutanan bertujuan untuk mengkriminalisasi rakyat yang masuk kawasan perkebunan dan hutan. Kemudian UU ini direvisi dengan perjuangan yang sangat lama. UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengkaplingkapling laut Indonesia, bahkan sampai ada yang dimiliki oleh asing dengan cara menyewa pulau-pulau kita dengan harga yang sangat murah. Dulu kita sempat mendorong DPR agar mencabut beberapa pasal yang sangat merugikan rakyat, tetapi hasil revisinya tidak merubah substansi hanya merubah redaksi.

UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, secara nama mungkin sangat bagus, tetapi UU ini hanya menguntungkan korporasi besar jika reforma agraria sejati tidak dijalankan. Petani skala luas dan skala kecil bisa memperoleh insentif dari negara, jadi semakin luas lahan pertanian yang dimiliki satu korporasi maka semakin besar pula insentif yang didapatkan dari negara.

UU Holtikultura merupakan produk UU yang mendorong lahirnya satu perusahaan benih besar dan meniadakan kearifan lokal. Jadi petani yang memiliki pengetahuan rekayasa genetik secara turun-temurun bisa dipidanakan atas nama hak paten perusahan besar. UU Pengadaan Tanah merupakan hukum legal pemerintah untuk mengambil tanah rakyat atas nama kepentingan nasional. Saya kira ini sebagian UU yang cukup berdampak langsung terhadap petani kecil.

Bagaimana pandangan anda terhadap keterlibatan aparatus negara dalam menangani konflik agraria? Dan di mana posisi mereka dalam konflik agraria?

Aparatus negara menggunakan pendekatan legal untuk masuk kedalam ranah agraria, misalnya menetapkan kawasan-kawasan strategis negara seperti perkebunan, pelabuhan maupun perusahaan-perusahaan swasta, dengan demikian mereka bisa masuk atas nama pengamanan aset-aset vital negara.

Idealnya posisi aparatus negara menjadi penegak keadalian dan mencegah meletusnya konflik-konflik agraria yang bersifat fisik dan kekerasan. Namun faktanya memang banyak keterlibatan aparatus negara sebagai pelindung perusahaan sehingga tidak jarang bentrok antara petani atau rakyat bersama TNI/Polri. Cara lainnya mereka menggunakan jasa preman untuk menggusur rakyat.

Dalam pelaksanaan reforma agrari memang sangat diperlukan dukungan dari TNI/Polri yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perluasan konflik agraria di lapangan. Namun sayangnya saat ini perluasan konflik agraria terjadi karena provokasi yang dilakukan oleh TNI/Polisi yang melibatkan jasa preman bayaran.

Warisan buruk SBY adalah tidak dijalankannya reforma agraria sehingga terjadi konflik agraria, ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Maka langkah awal apa yang harus dilakukan oleh Jokowi-JK untuk meredam konflik kekerasan di agraria?

Melalui kementerian agraria ada dua tahapan yang harus dilakukan oleh Jokowi-Jk, pertama membuka ruang negosiasi, misalnya dengan membentuk pengadilan agraria untuk

menyelesaikan masalah-masalah agraria yang terjadi secara struktural dan sudah sangat lama. Konflik agraria tidak bisa diselesaikan di pengadilan negeri seperti saat sekarang ini.

Kedua adalah membentuk badan khusus yang akan menjalankan reforma agraria. Tentu hal ini sudah sangat lama didorong oleh aktivis agraria namun sampai saat ini belum juga terlaksana. Sifat dari lembaga ini adhoc (sementara) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Tugasnya adalah mendata semua luas kawasan sumber agraria dan menetapkan mana kawasan yang menjadi hak kelola rakyat dan mana yang menjadi hak perusahaan.

Dalam kerja-kerjanya lembaga ini harus berkerja sama dengan masyarakat sipil dan untuk hal itu kita telah siap, yaitu melalui Komite Nasional Reforma Agraria (KNRA). Tanpa keterlibatan masyarakat sipil maka agenda reforma agraria tidak akan maksimal. Sekarang ini sedang berkembang wacana akan dibentuk Satgas Agraria, hal ini harus disambut positif. Jika satgas ini dibentuk maka dia berfungsi untuk pendataan konflik dan verifikasi data yang berada di dalam KNRA.

Apakah yang harus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar reforma agraria bisa terwujud?

Hal pertama yang harus kita ingat adalah Menteri tidak mempunyai visi dan misi, yang mempunyai visi dan misi adalah presiden. Untuk itu menteri terkait harus menterjemahkan visi misi Presiden. Jika Jokowi ingin berdaulat dalam bidang pangan melalui program peneyerahan lahan seluas 9 juta hektar kepada rakyat maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus menterjemahkan menjadi satu program utuh mengenai agenda reforma agraria. Tidak sekedar hanya bagi tanah melalui sertifikasi seperti pemerintahan sebelumnya.

Tanah, modal, teknologi dan program penunjuang lainnya harus diberikan kepada petani skala kecil sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya. Bila taraf ekonominya dan martabatnya sebagai petani terangkat, baru diberikan sertifikat sebagai hukum penguat hak atas tanah.

Tanda-tanda Jokowi akan menjalankan reforma agraria bisa kita lihat dari keempat prasyarat yang sering diutarakan oleh Pak Gunawan Wiradi, salah satu pakar agraria di Indonesia. Pertama apakah sudah ada kemauan politik yang kuat dari Jokowi untuk menjalankan reforma agraria, kedua apakah sudah ada organisasi rakyat yang kuat untuk mendorong reforma agraria, ketiga apakah data-data pemerintah sudah lengkap, baik lahan konflik dan sebaran konfliknya sehingga bisa menjadi konsumsi publik. Terakhir apakah kepentingan elit politik sudah terpisahkan dari elite bisnis atau pengusaha yang menguasai sumber agraria selama ini.

Jika Jokowi sudah melakukan pra kondisi di keempat hal di atas barulah kita bisa berharap banyak bahwa Jokowi-JK akan menjalankan reforma agraria sejati, seperti yang kita harapkan.



Apa Kabar NKB 12 Kementerian/Lembaga?

Bertempat di LIPI Bogor, 13 Juni 2014 lalu terselenggara diskusi terfokus dalam rangka memperingati satu tahun Nota Kesepahaman Bersama 12 Kementrian/ Lembaga (NKB 12 K/L) tentang pengukuhan kawasan hutan. Tema besar agenda ini adalah"Satu Tahun Perjalanan Nkb 12 K/L: Adakah Perubahan Wajah Kehutanan Nasional?"

Diskusi Publik yang dihadiri oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Ferakan Reforma Agraria (AGRA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan orrganisasi lainnya ini bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi kinerja Kementrian/Lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama yan telah ditandatangi 11 Maret 2013 lalu.

NKB 12 K/L dianggap sebagai peluang politik hukum yang tersedia untuk men jalankan reforma agraria di sektor kehutanan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan NKB adalah perluasan wilayah kelola rakyat dan penyelesasian konflik agraria demi mempercepat pengukuhan kawasan hutan.



[Suasana Diskusi Publik Menyikapi Masalah Agraria Sektor Hutan di Jawa]

PELUANG-PELUANG PERSIAPAN REFORMA AGRARIA DALAM UU DESA



[Narasumber dari kiri ke kanan Arie Sudjito, Gunawan Wiradi, Budiman Sudjatmiko, Abdon Nababan dan Yenni Sucipto saat pemaparan peluang dan tantangan reforma agraria melalui UU NO.6/2014 Tentang Desa]

Dalam rangka menemukan peluang-peluang pelaksanaan reforma agraria berkaitan dengan lahirnya UU No 6/2014 tentang Desa, KPA pada 5 Juni 2014, menyelenggarakan Workshop sehari Bertema "Membangun Peluang dan Model Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Implementasi UU Desa. Bertempat di Jakarta, Agenda ini menghadirkan sejumlah Narasumber, antara lain: Gunawan Wiradi (Dewan Pakar KPA); Budiman Sudjatmiko (Anggota DPR RI Komisi II); Yeni Sucipto (Sekjend FITRA); Abdon Nababan (Sekjend AMAN) dan Arie Sujito (Peneliti sekaligus Dosen UGM).

Workhsop ini menghasilkan beberapa tindak lanjut penting, yaitu mengawal penyusunan RPP Pelaksanaan UU Desa (penyelenggaraan pemerintahan desa & Keuangan desa) serta advokasi terhadap lembaga pemerintah yg menjalankan UU Desa (Kemendagri & Kemenkeu), mendorong pembentukan "institut pembaruan desa" untuk mendidik pemimpin dan kader-kader gerakan rakyat pedesaan serta akan menyusun manual untuk memahami secara kritis dan menggunakan UU Desa secara progresif sebagai alat memperkuat gerakan rakyat di pedesaan. Workshop tersebut dihadiri oleh lembaga masyarakat sipil lainnya seperti AGRA, Gabungan Aksi Petani Indonesia (GAPI), Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Nelayan Indramayu, Oxfam, KIARA, SAINS, Aliansi Petani Indonesia (API) dan Bina Desa. GA

Pertemuan Kampung:

Saatnya Penataan Ekonomi Desa



[Suasana pertemuan kampung KPA Jatim]

Salah satu bagian dari reforma agraria adalah melakukan penataan ekonomi rumah tangga petani pasca lahan sudah dikuasai secara fisik. Di Jawa Timur sendiri sudah mulai menjadikan penataan produksi dan distribusi hasil pertanian sebagai agenda lanjutan pasca redistribusi lahan. Contoh wilayah yang telah melakukan penataan hasil produksi pertanian adalah Blitar, Jawa Timur.

Acara yang berlangsung pada 10-11 Juni 2014 di Malang ini dihadiri oleh kordinator KPA wilayah Jawa Timur, Ubed Anom. Dalam kesempatan tersebut dia menjelaskan bahwa "saat ini KPA Jawa Timur mempunyai tugas untuk advoksi penyelesaian konflik agraria, memperluas gerakan reforma agraria dan menata hasil produksi pertanian".

Adapun anggota KPA Jawa Timur yang datang berasal dari Blitar, Malang Selatan, Jombang, Nganjuk, Lumajang dan Jember. Dari pertemuan tersebut ada beberapa petani menyampaikan kondisi gerakan mereka di basis-basis. Di antaranya adalah petani dari Nganjuk yang tergabung dalam Serikat Petani Anjuk Ladang Berdaulat (SERAB), mengatakan "dua tahun terakhir ini mereka mengoptimalkan produksi dan distribusi hasil pertanian unggulan seperti padi organik dan bawang merah". Untuk mendukung kegiatan ini maka SERAB melakukan pelatihan terhadap anggotanya supaya, tujuan menjadi petani mandiri tercapai.

Penjelasan yang lain datang dari petani Blitar yang tergabung dalam Peguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB). Di sana mereka mengembangkan cengkeh dan semangka di lahan redistribusi serta mengembangkan kredit union yang merupakan bagian dari simpan pinjam rakyat.

Walau masih banyak kekurangannya, baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi, kegiatan ini terus berjalan. Masyarakat mulai sadar bahwa kegiatan yang mereka lakukan sekarang adalah bagian dari untuk mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA).AGP

Reforma Agraria Bukan Hanya Agenda Petani



[Seminar "Peran Reforma Agraria dalam Kedaulatan Pangan" Universitas Juanda]

Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Juanda bekerja sama dengan KPA dan Sawit Watch menyelenggarakan Seminar "Peran Reforma Agraria dalam Kedaulatan Pangan" di Bogor pada 18 Juni 2014 lalu. Ketua Himagrotek Universitas Juanda, Riski mengatakan bahwa agenda ini adalah untuk menegaskan kembali cita-cita pendiri bangsa yang tercantum dalam UUPA 1960 serta mensosialisasikan kepada seluruh elemen kaum intelektual, agar bisa memahami UUPA 1960 demi tercapainya kedaulatan pangan. Narasumber dalam seminar yang diikuti oleh sekitar dua-ratusan mahasiswa serta petani ini menghadirkan Galih Andreanto dari Kepala Departemen Kampanye dan Kajian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Akademisi Reforma Agraria Universitas Juanda, Sudri Heryana dan kepala departemen lingkungan Sawit Watch, Carlo Lumban Raja.

"Reforma Agraria bukan saja agenda petani semata, namun ini adalah agenda bangsa Indonesia sehingga reforma agraria harus dijadikan kerangka utama pembangunan nasional ke depan," papar Galih. Namun sayangnya reforma agraria tidak dijadikan program utama para kandidat capres ke depan, jika ada hanya diselipkan sebagai pelengkap visi-misi yang lebih populis, padahal, Indonesia akan terkena krisis agraria yang parah ke depan diantaranya: ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, impor pangan, kelaparan dan kemiskinan pedesaan.

Pelatihan Hutan Jawa: Pembaruan Agraria Sektor Hutan di Jawa

Keberadaan Perhutani yang mengklaim 2.4 Juta Ha di Pulau Jawa telah menghasilkan banyak konflik agraria dengan masyarakat penggarap dan sekitar hutan. Untuk itu perlu sebuah gerakan untuk melakukan pembaruan agraria di sektor hutan di Jawa khususnya yang menyasar penguasaan skala luas, yaitu Perhutani.

Dalam rangka memperkuat pengetahuan petani, gerakan dan advokasi yang dilakukan oleh organisasi rakyat, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (KPA dan AGRA) telah menyelenggarakan Pelatihan bagi pimpinan serikat tani se-Pulau Jawa. Bertempat di Bogor, Jawa Barat sekitar 30-an aktivis mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari, dimulai dari 19 hingga 21 Juni 2014. Hasil dari pelatihan ini adalah mengkonsolidasikan gerakan dan advokasi atas Hutan Jawa serta menghasilkan modul pendidikan untuk petani hutan Jawa. Ke depan akan diselenggarakan pelatihan hutan Jawa di tiap daerah yang fokus pada perjuangan reforma agraria sektor kehutanan di Pulau Jawa.

Ke depan para petani yang berkonflik dengan Perhutani akan melakukan upaya pembubaran Perhutani. Kedua, melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber hutan yang lebih berprinsip adil dan kolektif sebagai perlawanan atas model monopolistik Perhutani. Ketiga, petani juga menyadari perlu ada penguatan organisasi. Keempat, membangun Persatuan gera kan petani hutan Jawa yang lebih solid dan terarah guna perjuangan yang lebih strategis; da kelima petani juga mencita-cita kemerdekaan sejati terbebas dari sistem penindasan saat ini.



[Salah satu sesi diskusi dalam Pelatihan Pimpinan Serikat Tani Se-Jawa]

KPA Jabar Selenggarakan Kaderisasi Pejuang Agraria



[Pelatihan Pengorganisiran Rakyat dalam Pembaruan Agraria KPA dan SPP]

Dalam rangka memperkuat posisi organisasi rakyat dalam menjalankan reforma agraria, KPA telah menyelenggarakan pelatihan dengan tema " Pengorganisasian Rakyat dalam Pembaruan Agraria" yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Pusdik SPP Pangandaran atas kerjasama KPA Wilayah Jawa barat dengan Serikat Petani Pasundan (SPP). Sebagai pemantik dalam pelatihan tersebut hadir DD Shineba dari Seknas KPA, Arip Yogiawan direktur LBH Bandung, Usep Setiawan Dewan Pakar KPA, serta Agustiana ketua DN KPA sekaligus sebagai Sekjen SPP. Maksud dari pelaksanaan pelatihan pengorganisasian rakyat dalam perjuangan pembaruan agraria ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kerja-kerja pendampingan, pengorganisasian serta untuk memperkuat dan merekatkan para kader petani, aktivis mahasiswa dengan organisasi rakyat di wilayah yang sama, khusunya di wilayah Jawa Barat. Hadir sekitar 30-an aktivis reforma agraria dari mahasiswa, pelajar dan pendamping serikat-serikat tani di Jawa Barat.

Pertemuan Tahunan Anggota Komite Pengarah Asia ILC

Pada 10-11 Juli 2014 anggota Komite Pengarah International Land Coalition (ILC) Asia mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal terkait dengan program-program di Asia. Pertemuan tersebut melakukan evaluasi kerja ILC Regional Asia selama enam bulan terakhir dan menyusun rencana kerja enam 6 bulan ke depan. Sebagai organisasi tuan rumah bagi ILC Asia, pimpinan KPA menjadi anggota komite ini.

Menurut Erpan Faryadi, Fasilitator ILC Asia, dua hal pokok yang menjadi urgensi dari pertemuan itu adalah persiapan Pertemuan Regional ILC Asia dan Land Forum 2014 yang akan digelar pada 6-10 Oktober 2014 di Gujarat India, menyusun rencana kerja dan anggaran untuk program kerja ILC Asia periode 2014-2015.



[Kunjungan Komisi pengarah ILC Asia disekretariat KPA Bali]

Tim ILC Asia Mengunjungi KPA Bali

Di sela pertemuan, para anggota Komite pengarah ILC Asia, yang berasal Philipina, Bangladesh, India, dan Indonesia serdiri, serta perwakilan ILC Roma, menyempatkan diri untuk mengunjungi Sekretariat KPA Wilayah Bali. Diskusi antara Pengurus KPA Wilayah dengan delegasi ILC seputar konflik agraria dan pengembangan ekonomi di wilayah dampingan di Sumberklampok. Terkait konflik, yang menjadi pembahasan utama adalah kasus penyerobotan lahan oleh perusahaan besar yang berakibat pada konversi lahan pertanian menjadi kawasan wisata. Akibatnya banyak warga kehilangan lahan dan sumber kehidupannya.

ILC memberi beberapa masukan, diantaranya mendorong kerjasama yang lebih kuat antara KPA Bali dengan Seknas KPA untuk mendorong proses politik ke pemerintahan, dan kedua, terkait pengembangan inovasi dalam hal pengelolaan lahan dan sistem produksi disarankan untuk mendaftar ke dalam program Facility for Target in Intervention dan Innovation (FTI). Ini adalah program yang juga didanai oleh ILC, khusus untuk masalah lahan. Pilihan pengajuan ke FTI didasarkan pada penyelamatan lahan mereka walaupun dalam skala kecil.

PENDIDIKAN REFORMA AGRARIA:
KPA Jateng Siap Membangun Basis Tani Yang Kuat



[Suasana Pendidikan Reforma Agraria KPA Jateng]

KPA/Jateng: Dalam suasana Pilpres 2014, keterlibatan aparat Negara dalam konflik agraria semakin meningkat. Posisi aparat Negara, baik Polri maupun TNI yang berada dipihak pengusaha seolah-olah menjadi musuh rakyat.

Perampasan tanah rakyat yang terjadi di Jawa Tengah-DIY untuk dijadikan perkebunan, pertambangan, kehutanan, , kelautan, taman nasional, dan sultan ground khusus wilayah DIY adalah bukti absennya pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria di tanah air.

Program PPAN dimasa SBY merupakan isapan jempol semata karena konflik agraria terus mengalami peningkatan. Satu-satunya jalan untuk mendorong reforma agraria agar bisa terlaksana adalah dengan membentuk organisasi rakyat yang kuat. Organisasi ini akan menjadi alat untuk merebut hak petani atas tanah, melakukan penataan produksi dan membentuk solidaritas antar petani.

Untuk itu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) wilayah Jawa Tengah bersama Seknas KPA akan melaksanakan pelatihan "Pendidikan Reforma Agraria dan Advokasi Konflik Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta: Membangun Basis Tani yang Kuat untuk Gerakan Reforma Agraria". Acara ini akan berlangsung di Bandungan, Semarang mulai dari tanggal 16-19 Juli 2014.

Peserta yang akan hadir berjumlah 35 orang yang terdiri dari pimpinan/perwakilan serikat petani dan agraria anggota KPA di Jateng dan Yogyakarta, maupun aktivis (mahasiswa/pekerja hukum) dari jaringan yang selama ini peduli dan akif mendukung gerakan tani. AGP

Petani Kulonbambang Blitar
Segera Kembangkan Ekonomi Alternatif



[KPA Jatim, Alumni I pelatihan kepemimpinan perempuan, tim seknas KPA, project officer SSE, tim IWE, Bina Desa]

Keberhasilan warga Dusun Kulonbambang, Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur melakukan Land reform disambut dengan usaha pengembangan ekonomi alternatif yang dicoba dijalankan di Dusun Kulonbambang hasil kerja sama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan International Women Empowerment (IWE). Usaha pertama yang dilakukan adalah pelaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Sekretariat KPA pada 18 Agustus 2014 lalu.

Acara yang dihadiri oleh Dewan Nasional dan KPA wilayah Jawa Timur, Alumni I pelatihan kepemimpinan perempuan, tim seknas KPA, project officer SSE, tim IWE, dan perwakilan dari Bina Desa ini bertujuan untuk membicarakan kabar terbaru dari para pihak di wilayah untuk dijadikan model pengembangan ekonomi usaha bersama dan mendorong model pengembangan ekonomi alternatif bagi petani dengan fokus utama kelompok perempuan dengan metode Social Solidarity Economy (SSE).

SSE sendiri merupakan sebuah metode pengembangan ekonomi alternatif menggunakan jaringan perekonomian horizontal atau hubungan non hierarchical antara operator berdasarkan pada praktek berbagi pengetahuan, pasar, informasi, dan sumber daya. Pendekatan etis dan berbasis nilai kepada pembangunan, mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keberlangsungan hidup di bumi, meningkatkan pencapaian keadilan sosial, ekologi, dan ekonomi, dan penciptaan berkelanjutan, manusiawi, dan budaya yang berjangka.

Metode tersebut dijalankan dalam masyarakat solidaritas sosial, suatu kondisi dimana seluruh aspek (sosial, budaya, ekonomi, politik, dll.) dalam suatu masyarakat dikerahkan untuk membangun kepentingan bersama. Dengan semangat solidaritas, demokrasi ekonomi dan politik, keadilan di semua aspek mulai laporan keuangan hingga jenis kelamin, usia, orientasi seksual, etnis, agama, dll, bersifat lokal, dan manajemen serta pengambilan keputusan di tingkat lokal. Maksud dan tujuan SSE dapat terwujud dalam bentuk koperasi, jaminan asosiasi reksa, pekerja organisasi yang berbasis pada praktek saling memberi bantuan, asosiasi pembelian bersama, dan perusahaan yang dikelola bersama.

Sebuah metode dengan ide-ide ideal tersebut tidak luput dari tantangan yang dapat mengancam keberlanjutan penerapan metode tersebut. Anggapan kebebasan individu dalam kelompok, kurangnya pengertian mengenai "hidup dengan baik" dalam masyarakat solidaritas sosial, dan berbagai penolakan atas dasar akumulasi kekayaan bagi beberapa pihak dapat menjadi hambatan dalam perjalanan SSE.

KPA dan Alumni UGM Dorong Reforma Agraria Demi Kedaulatan Pangan



[Suasana diskusi "Kedaulatan Pangan Sebagai Pilar Utama Kedaulatan Bangsa"]

Menjelang pemilihan presiden yang lalu, sejumlah kelompok mulai resah mengenai kondisi pangan di Indonesia. Pasalnya ada'ah tingginya mpor pangan yang dikarenakan pemerintah tidak menyediakan tanah bagi petani kecil dan terjadi liberalisasi di bidang agraria. Liberalisasi ini telah melengkapi kondisi kelam agraria.

Hal ini membuat aktivis, akademisi dan organisasi tani menyusun satu wacana untuk disampaikan kepada Jokowi sebagai salah satu calon presiden yang bertarung pada saat itu. Salah satu kelompok akademisi yang mewacanakan kedaulatan pangan adalah Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA). Sri Sultan Hamengkubuwono X, Rektor UGM, para Dekan Fakultas UGM, Anies Baswedan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan kelompok tani turut hadir dalam seminar yang bertemakan "Kedaulatan Pangan Sebagai Pilar Utama Kedaulatan Bangsa"(2/6/2014). Dalam acara penutup, rektor dan sejumlah guru besar dari UGM menyerahkan satu dokumen yang berisi tentang cara mencapai kemandirian bangsa.

Di bidang pertanian pemerintah lebih mengutamakan pertanian skala luas dalam bentuk perkebunan sehingga lahan-lahan kecil milik petani terserap ke dalamnya. Usaha pertanian yang berorientasikan kepada modal ternyata semakin mempercepat hilangnya tanah petani berskala kecil. Komoditas perkebunan yang didominasi oleh sawit telah

mengakibatkan penurunan kuantitas hasil pertanian pangan. Atas kondisi ini pemerintah mengambil kebijakan impor dengan tujuan untuk mengisi kekurangan pangan dalam negeri. Pemikiran pemerintah yang seperti ini dinilai sangat sempit dan menunjukkan betapa tidak berdayanya pemerintah untuk memperjuangkan perbaikan kondisi pangan Indonesia.

Padahal menurut Iwan Nurdin, Sekjen KPA, yang hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa kedaulatan pangan hanya bisa dicapai jika pemerintah telah menjalankan reforma agraria sejati. Tanah harus menjadi hak petani penggarap yang kemudian program pendukung untuk mengelola pertanian diberikan dalam satu agenda yang tidak bisa dipisahkan. Sistem sertifikasi di bidang pertanahan pada pemerintahan SBY bukan menjadi bagian reforma agraria karena tidak didahului oleh program pendukung pasca redistribusi tanah dilakukan.

Tingginya impor pangan ternyata berdampak terhadap perekonomian rumah tangga petani yang ada di pedesaan. Menurut Guru Besar UGM Prof.Maksum Mahfoedz "pemerintah Indonesia belum mempunyai satu agenda untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produk pangan naisonal. Sebagai contoh, pertanian-pertanian lokal yang cenderung masih menggunakan teknologi pertanian tradisional menandakan bahwa pemerintah tidak besungguh-sungguh untuk mengembangkan industri teknologi pertanian.

Mahalnya biaya produksi pertanian dan murahnya barang impor pangan membuat produk pertanian lokal tidak mampu bersaing di negeri sendiri. Pilihan masyarakat Indonesia untuk membeli produk impor yang lebih murah merupakan satu hal yang wajar di dalam mekanisme pasar. Namun pemerintah harus bertanggung jawab terhadap nasib petani kecil yang menjadi korban dalam sistem liberal ini. Beliau memaparkan, "pemerintah harus bisa mengangkat dan melakukan perubahan terhadap nasib pedesaan yang miskin, khususnya kaum tani".

Bila ditarik jauh kebelakang, impor pangan dimulai sejak era 80-an dan sejak saat ini Negara maju menguasai produk pangan Indonesia sebesar 70%. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar menjadi tujuan negara-negara produktif untuk memasarkan produknya. Untuk itu mereka melakukan Intervensi terhadap pemerintah agar Indonesia masuk ke dalam pusaran pasar bebas.

Atas kondisi yang dijelaskan di atas maka pemerintah harus melakukan proteksi terhadap produk lokal. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan modal kepada petani dan mengembangkan teknologi industri pertanian sehingga hasil produksi pertanian bisa meningkat secara kualitas dan kuantitas. Jaminan sosial juga diperlukan sehingga keluarga petani mempunyai harapan yang lebih baik untuk hidup.AGP

Agung Podomoro Land (APL) Rampas Tanah Warga Teluk Jambe Karawang



[Represifitas aparat terhadap aksi warga eks NV Tegal Waroe Teluk Jambe]

Konflik agraria antara ribuan warga yang menguasai dan menduduki tanah negara eks NV Tegal Waroe di Teluk Jambe, Karawang dengan APL masih berlanjut. Tindakan Agung Podomoro Land yang menggusur warga dengan melibatkan 7000 Brimob berujung rusuh. Pasalnya warga mempertahankan haknya atas tanah yang secara turun-temurun sudah berada di areal seluas 350 hektar.

Akibat dari bentrokan tersebut 9 petani dan 4 buruh yang melakukan aksi solidaritas terhadap perjuangan petani ditangkap. Secara historis, petani telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1949. Masalah ini muncul pada 30 mei 1990 ketika PT. Makmur Jaya Utama melakukan perjanjian pengoveralihan hak garapan kepada PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Selanjutnya, PT.SAMP mengoveralihkan lagi ke PT Agung Podomoro Land untuk dibangun bisnis property.

Walau secara hukum pertanahan APL lemah karna yang mempunyai sertifikat tanah adalah petani, hasrat APL untuk menjalankan bisnis property tetap dijalankan. Mereka mengesekusi lahan tersebut berdasarkan PK Nomor 160 PK/PDT/2011 yang memenangkan PT SAMP, saat ini telah menjadi PT APL.

Lebih dari seminggu kondisi di tiga desa, yaitu Desa Margamulya, Desa Wanasari dan Desa Wanakerta sangat mencekam. Brimob membangun posko-posko, melarang warga masuk kerumahnya dengan memasang pagar kawat berduri di lahan 350 ha dan pasokan listrik ke tiga desa itu diputus.

Konflik agraria seperti ini akan tetap terjadi apabila pemerintah tidak serius menjalankan reforma agraria. Pemerintah seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjamin kepastian hidup bagi masyarakat. Penyelesaian konflik dengan menjalankan reforma agraria adalah satu-satunya solusi untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat.AS.

Demo Mabes POLRI-Petani Karawang Serbu Jakarta

Dalam rangka merespon aksi perampasan tanah, kekerasan dan konflik agraria di Telukjambe Barat, Karawang para petani Karawang dan berbagai organisasi rakyat menggelar aksi di depan Mabes Polri, Jakarta (Senin/30/06/2014). Aksi Mobilisasi yang melibatkan ratusan petani karawang, buruh dan mahasiswa serta berbagai NGO dan organisasi rakyat lainnya juga disertai dengan laporan tindakan kekerasan, perampasan tanah serta pengrusakan bangunan milik petani oleh Perusahaan yang dikawal oleh Polisi dan Preman. Aksi yang diikuti oleh 500-an peserta ini bertujuan untuk menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap warga di tiga desa, Telukjambe Barat, Karawang. Setelah menggelar aksi dan laporan ke Mabes Polri, masa aksi juga menggelar aksi unjuk rasa ke Kompolnas agar dapat memindak tegas aparat kepolisian yang main mata dengan perusahaan serta melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi kepada para petani sejak eksekusi lahan tanggal 24 Juni lalu.



[Aksi warga Teluk Jambe menolak perampasan lahan dan kekerasan di Mabes Polri]

Solidaritas Tanpa Batas
Untuk Perampasan Tanah Petani

Berlakunya praktek ekonomi politik ultra liberal yang mengakibatkan investasi terhadap sumber kekayaan alam skala luas, berimplikasi pada konflik agraria di seluruh wilayah tanah-air. Konflik agraria yang mengemuka menjadi persoalan nasional, ditandai dengan merebaknya letusan konflik perebutan tanah antara petani karawang dengan korporasi properti PT.Agung Podomoro Land yang dibantu oleh aparat Kepolisian serta preman bayaran. Kini sekitar 1.200 petani Karawang terancam keberlanjutan hidupnya, karena akses tanahnya diputus oleh kekuatan bersenjata negara.



[Aksi solidaritas GMNI Samarinda untuk petani Teluk Jambe]

Atas tragedi kejahatan perampasan tanah tersebut, muncul banyak solidaritas dari berbagai kalangan. Solidaritas dari dalam negeri datang dari para petani Rembang, petani, petani plasama di Lampung Barat. Kecaman terhadap perampasan tanah terhadap para petani Karawang juga datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Twedy Noviady Ginting, Ketua Presidium GMNI mengecam tindakan pengusiran secara paksa oleh aparat dan mendesak pemerintah untuk memberi jaminan lahan kepada 1200 petani tersebut. Tak hanya itu, GMNI Cabang Samarinda turut bersolidaritas terhadap perampasan tanah paksa yang disertai dengan penembakan petani tersebut. Elemen Mahasiswa yang turut menggelar aksi kecaman dan solidaritas terhadap petani Karawang juga datang dari Front Pelajar dan Pemuda Indonesia (FPPI) Jakarta, LPM Didaktika, LPM Institut (UIN), LPM Aspirasi (UPN) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Kedaulatan Tanah (AMUKAN). Mereka menggelar aksi simpatik di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta pada Jum'at 27 Juni 2014 dengan tema propaganda, "STOP KEKERASAN TERHADAP PETANI INDONESIA." Selanjutnya, solidaritas juga datang dari Front Aktivis Mahasiswa (FAM UNPAD). Mereka dalam rilisnya mengutuk kekerasan yang dilakukan aparat terhadap petani dan warga Karawang. Dukungan terhadap para petani di Karawang juga datang dari KBM Fakultas Pertanian Universitas Tirtayasa, Serang, Banten. Selasa, 24 Juni mahasiswa Untirta bersolidaritas dengan mengumpulkan koin peduli petani Karawang. Tak hanya mahasiswa, solidaritas juga datang dari Buruh di Bandar Lampung, pada 29 Juni 2014 puluhan buruh menggelar aksi simpatik Malam 1.000 lilin di Bundaran Adipura, Bandar Lampung.

Dukungan yang meluas juga datang dari Jepang, Rudi Casrudi, aktivis agraria Indonesia yang sedang belajar di Asian Rural Institute (ARI) di Jepang menggalang dukungan untuk petani Karawang. Rudi besama-sama teman dari berbagai bangsa dan negara di Jepang berfoto dengan poster-poster tuntutan agar menghentikan kekerasan terhadap petani Karawang dan Mendesak Polisi untuk menarik diri dari areal konflik agraria di Karawang. Tak hanya Jepang, saudara-seperjuangan para petani yaitu Buruh yang berjuang di Hongkong dan Tiongkok juga menggelar aksi. Rautsan buruh yang tergabung dalam Asosiasi Buruh Migran Indonesia di Hong Kong (ATKI-HK), Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR), Front Perjuangan Rakyat (FPR), dan Asian Human Rights Commission (AHRC). Acara ini adalah bentuk dukungan untuk petani dan buruh yang menjadi korban kekerasan aparat negara di Rembang, Jawa Tengah, dan Karawang, Jawa Barat, serta korban penyiksaan lainnya di Indonesia.



[Solidaritas Petani Rembang yang menolak Tambang Karst untuk Petani Karawang yang tertimpa kejahatan perampasan tanah oleh PT Agung Podomoro Land]

KPK akan Tindaklanjuti Aduan Korupsi Agraria Karawang



[Aksi SEPETAK, KPA, PBHI-Jakarta, ICW dan KONTRAS di KPK]

KPA/Jakarta: Membawa hasil-hasil panen, ratusan petani Karawang yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (SEPETAK) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta (21/07). Bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), PBHI-Jakarta, ICW dan KontraS para petani menggelar orasi menyerukan kepada KPK untuk dapat mendalami dugaan korupsi agraria di Karawang. Beberapa perwakilan masa aksi setelah orasi digelar juga menunjukan adegan teatrikal. Teatrikal yang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswa UKI ini menggambarkan kekejaman perampasan tanah yang mengakibatkan para petani menderita dan tertindas karena terusir oleh Agung Podomoro Land yang dibantu oleh Aparat kepolisian dan preman.

Para peserta aksi yang membawa hasil panen dari hasil berbudidaya di tanah tiga desa yang sedang dihantam konflik agraria diserahkan secara simbolis kepada perwakilan KPK. Hasil panen berupa kacang panjang, pisang, singkong dan ketimun seluruhnya diserahkan kepada KPK. Beberapa ibu-ibu petani mengatakan bahwa ini adalah hasil panen terakhir kami di tanah Karawang, karena sejak perampasan tanah berkedok eksekusi lahan 24 Juni lalu, para petani tak bisa lagi bertani karena dihalangi oleh aparat kepolisian dan preman perusahaan.

"Kami berharap agar KPK dapat mengusut tuntas dan mengadili aparat penyelenggara negara di Karawang yang korupsi dan akibat korupsi itu merampas tanah kami," ungkap Engkos, Sekjen SEPETAK. Engkos mengatakan bahwa KPK harus juga menjerat pihak-pihak swasta yang terlibat dalam korupsi agraria Karawang sehingga para petani bisa kembali menggarap tanah-airnya sendiri tanpa halangan dari aparat kepolisian, perusahaan dan preman.

Sementara Hilal Tamami, Ketua umum SEPETAK mengatakan bahwa kedatangan para petani Karawang ke KPK ini bermaksud mendukung langkah KPK. Hilal mengatakan eksekusi lahan pada 24 Juni yang dipaksakan patut dicurigai dilumasi oleh praktek Ko-

rupsi Kepala Pengadilan Negeri Karawang. "Kecurigaan kami ini berdasar, sejumlah fakta pada saat proses eksekusi yang cacat prosedur adalah tim juru sita tidak bisa menunjukan batas-batas areal yang akan dieksekusi. Cacat kedua adalah eksekusi dilakukan di lahan seluas 350 Ha, padahal dalam putusan hanya 67Ha. Proses Eksekusi ini juga tidak jelas dan tidak sesuai dengan amar putusan. Karena, masih ada putusan yang tumpang tindih atas objek sengketa dan masih berjalannya perkara atas objek dalam proses Pengadilan. Bahkan, dalam penunjukan batas dalam eksekusi, orang yang ditunjuk bukanlah pihak yang berkompeten yaitu bukan pemohon eksekusi atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk batas-batas". Jelas Hilal.



[Perwakilan KPK yang menemui masa aksi SEPETAK]

Hilal menambahkan bahwa proses eksekusi janggal, karena penetapan eksekusi di dusun Kiara Jaya, Desa Marga Mulya dibacakan oleh Wakapolres Karawang Kompol Haryo Tejo, bahkan berita acara eksekusi juga tidak ada. "Dan yang paling mengiris rasa kemanusiaan adalah proses eksekusi dilakukan dengan mengerahkan ribuan aparat kepolisian dar melakukan kekerasan terhadap war ga, tutup Hilal.

Aksi KPK ini mendapat respon positif dari KPK. KPK bersedia menemui beberapa perwakilan masa untuk berdialog di dalam gedung KPK. Lima orang perwakilan dari Serikat Petani Karawang, KPK, PBHI-Jakarta dan KontraS diterima KPK di salah satu ruangan. Di dalam dialog tersebut KPK merespon positif pengaduan masyarakat dan akan meneruskan laporan warga ke bidang penindakan KPK. (GA)



[Aksi SEPETAK dengan membawa beragam hasil bumi di KPK]

Usut Tuntas Korupsi Di Karawang Terkait Perampasan Tanah Oleh PT. Samp/Agung Podomoro Land

[Siaran Pers Bersama KPA, KontraS, PBHI Jakarta, ICW dan Serikat Petani Karawang atas Penangkapan Bupati Karawang, Ade Swara dan Pegawai Agung Podomoro Land (APL) di Rumah Dinas Bupati Karawang pada 17-18 Juli 2014]

Kamis hingga Jumat (17-18/07/2014) telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Dinas Bupati Karawang dan salah satu pusat perbelanjaan di Karawang. Hasil OTT tersebut adalah penangkapan terhadap Ade Swara (Bupati Karawang), Nur Latifah (Istri Bupati Karawang), Aking Saputra (Perwakilan PT. Agung Podomoro Land di Karawang), Rajen Diren (Perwakilan PT. Agung Podomoro Land di Karawang), Nana (Kepala Desa Cilamaya) dan tiga orang lainnya.

Kuat dugaan penangkapan kedelapan orang tersebut terkait dengan korupsi (gratifikasi) izin tata ruang di Karawang, yaitu penyuapan oleh perusahaan swasta dalam hal ini adalah PT. Agung Podomoro Land kepada Bupati Karawang. Penyidik KPK telah menyita sejumlah barang bukti, yakni sejumlah uang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan beberapa berkas dokumen. Jika diubah dalam Rupiah, nilai uang tersebut mencapai miliaran. Kemudian, sehari setelahnya, pihak Agung Podomoro Land yang tertangkap dalam OTT ini dilepaskan oleh pihak KPK karena dianggap sebagai korban pemerasan pihak Bupati Kabupaten Karawang.

Meski demikian, APL sebagaimana diketahui, mempunyai sejumlah proyek di Karawang. Salah satunya adalah PT. Sumber Air Mas Pratama/SAMP yang sahamnya telah diakuisisi oleh PT. Agung Podomoro Land dan telah merampas tanah seluas 350 Ha milik warga tiga Desa di Margamulya, Wanakerta dan Wanasari, Karawang. Berkedok eksekusi lahan berdasarkan putusan kepala PN Karawang, Marsudin Nainggolan pada 24 Juni 2014 dengan dibantu ribuan aparat kepolisian (Brimob) dan preman dalam melakukan penggusuran atas tanah warga. Proses penggurusan ini dilakukan dengan tindakan kekerasan, represif dan intimidatif kepada warga tiga desa.

Sejumlah fakta pada saat proses eksekusi yang cacat prosedur adalah: tim juru sita tidak bisa menunjukan batas-batas areal yang akan dieksekusi. Proses Eksekusi ini juga tidak jelas dan tidak sesuai dengan amar putusan. Karena, masih ada putusan yang tumpang tindih atas objek sengketa dan masih berjalannya perkara atas objek dalam proses Pengadilan. Dalam hal penunjukan batas, orang yang ditunjuk bukanlah pihak yang berkompeten yaitu bukan pemohon eksekusi atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk batas-batas. Tindakan eksekusi yang cacat prosedur juga dilindungi oleh aparat kepolisian dengan tindakan kekerasan terhadap warga yang mempertanyakan mengenai eksekusi yang cacat prosedur.

Kami menduga, eksekusi lahan yang cacat prosedur dan dipaksakan ini bagian dari indikasi suap oleh PT SAMP/PT Agung Podomoro Land kepada Kapolres Karawang Ajun Komisaris Besar Daddi Hartadi dan Kapolda Jabar Irjen Pol Mochamad Iriawan serta Kepala Pengadilan Negeri Karawang Marsudin Nainggolan.

Indikasi ini kami nilai karena kepala Pengadilan Negeri Karawang sebelumnya beberapa kali menyatakan putusan PK Nomor 160 PK/PDT/2011 yang memenangkan PT. SAMP tidak bisa ditindak lanjuti dengan eksekusi. Ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain, adanya tumpang tindih putusan di atas tanah berperkara tersebut, tidak memiliki batas tanah serta terdapat tanah yang bersertipikat di atas tanah yang diklaim PT. SAMP. Namun saat PN Karawang dipimpin oleh Marsudin Nainggolan, dua pekan dia menjabat sudah mengeluarkan surat anmaning/teguran terhadap pihak yang kalah. Atau lebih tegasnya peringatan kepada pihak yang kalah bahwa akan segera dilaksanakan eksekusi lahan dengan uang kerohiman sebesar Rp. 4000/meter. Marsudin Nainggolan berdalih bahwa dia hanya bertugas menjalankan putusan bukan pada kapasitas mengkaji putusan. Ini semua dapat terjadi karena PT.SAMP telah diakuisisi oleh Agung Podomoro Land.

Kami mendesak agar KPK menghubungkan OTT beberapa waktu yang lalu dengan PT SAMP/PT Agung Podomoro Land dan penyalahgunaan wewenang kepala PN Karawang sehingga secara sewenang-wenang mengeluarkan surat putusan eksekusi. Eksekusi yang dipaksakan telah merampas hak hidup petani di Karawang dengan memutus akses warga terhadap lahan pertanian dan hingga kini pengrusakan pohon dan tanaman warga serta rumah terus-menerus dilakukan oleh perusahaan yang dibantu polisi dan preman.

Atas dasar tersebut kami menyatakan menyatakan sikap:

1. Mendesak KPK untuk mengusut PT SAMP/ PT Agung Podomoro Land dalam proses eksekusi dan memeriksa para penyelenggara negara seperti Kapolda Jabar, Kapolres Karawang dan Kepala Pengadilan Negeri Karawang yang telah mengakibatkan tergusurnya warga 3 desa dari tanah miliknya sendiri.
2. Mendesak ditariknya aparat kepolisian dari areal konflik agraria di Desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari agar warga dapat kembali melangsungkan aktifitas sosial, ekonomi, politik dan spiritual sebagaimana biasa.
3. Mendesak pencopotan Kapolres Karawang, Kapolda Jabar dan Ketua Pengadilan Negeri Karawang karena bertindak sewenang-wenang dalam konflik agraria, mengingkari rasa keadilan rakyat dan mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan.
4. Mendesak penyelesaian konflik-konflik agraria yang terjadi di negeri ini secara tuntas dan menyeluruh dalam kerangka pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.

Demikian Pernyataan Sikap ini dibuat untuk menjadi perhatian semua pihak.
Jakarta, 18 Juni 2014

Hormat kami,
KPA, KontraS, PBHI Jakarta, ICW dan Serikat Petani Karawang
Kontak: Iwan Nurdin – Sekjend KPA (081229111651)

Konflik Agraria Sambirejo
Berujung Kriminalisasi Petani



[Pertemuan anggota FPPKKS dengan pihak BPN Kanwil Jateng]

Konflik agraria di Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah terjadi di delapan titik, yaitu Desa Sukorejo, Jambeyan, Sambi, Dawung, Sambirejo, Kadipiro, Musuk dan Jetis. Sengketa lahan seluas 425 ha ini sudah terjadi sejak 1965 yang lalu dengan PTPN IX. Pada awalnya hak kepemilikan sah dipegang oleh warga sesuai dengan SK No.2971X1172/DC/64 dan 3891z/173/72/DC164 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Daerah Jawa Tengah (KINAD) pada 4 Januari 1964. Namun di sisi lain, PTPN IX ingin memperluas lahan perkebunannya dengan cara menyewa tanah milik warga.

Usaha PTPN IX ini tidak berhasil karena warga menolak usulan PTPN IX dan tetap mengelola tanah mereka secara mandiri. Kepemilikan tanah berubah saat Gerakan Satu Oktober (Gestok) 1965 meletus dan munculnya isu PKI yang mengakibatkan banyak petani ditangkap karena mempertahankan tanahnya. Tanah warga akhirnya didapatkan oleh PTPN IX dengan mudah dan warga banyak yang mengungsi ke tempat sanak saudaranya, bahkan bersedia menjadi buruh perkebunan.

Setelah Soeharto jatuh maka pertengahan 2000 petani mulai memperjuangkan haknya atas tanah yang telah dirampas oleh PTPN IX. Berbagai cara diupayakan oleh petani untuk mendapatkan haknya kembali, diantarata adalah mendatangi DPR RI, Komnas HAM, Ombudsman, Kementerian Keuangan, Kementrian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri. Perjuangan ini mulai mendapat titik terang pada saat DPR RI membentuk Pansus Pertanahan, 15 Januari 2005. Walau pansus ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kasus tanah yang ada di Sambirejo, ternyata keberadaan pansus tidak berdampak positif ke masyarakat karena kasus tanah tidak kunjung usai.

Warga mulai bisa menguasai lahan secara fisik pada saat HGU PTPN IX telah habis, 30 Desember 2008. Empat tahun kemudian, warga yang tergabung dalam Forum

Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) mendesak BPN RI untuk mengembalikan hak mereka yang dirampas oleh PTPN IX. Hasilnya adalah tanggal 4 September 2014 dilakukan pemetaan wilayah konflik antara warga, Kanwil BPN Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, Pemda Sragen, Dinas Perkebunan (provinsi dan kota), Dinas Kehutanan (provinsi dan kota), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Walau sudah dilakukan pemetaan pihak PTPN IX terus melakukan provokasi dan intimidasi bersama dengan Polres Sragen. Salah satunya adalah PTPN IX menyerbu petani dengan menurunkan 5.000 buruh perkebunan. Tindakan ini dibalas oleh warga dengan merusak tanaman PTPN IX yang berujung pada penangkapan terhadap Sunarji, Sarjimin dan Suparno. Tanpa ada proses penyelidikan dari pihak kepolisian mereka dikenai pasal 170 KUHP serta pasal 351 dan 406 jo.pasal 55 dengan vonis hukuman 1,5 tahun.



[Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo /FPKKS]

Petani Sragen Datangi Komnas HAM

Berbagai upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak PTPN IX dan polisi tidak membuat perjuangan petani Sragen yang tergabung dalam dalam FPKKS surut. Pengurus FPKKS mendatangi Komnas Ham untuk melaporkan berbagai kejadian konflik agraria yang melibatkan pihak kepolisian, diantaranya adalah penahanan tiga orang rekan mereka, Brimob yang melakukan sweeping dan melepaskan beberapa tembakan untuk menakuti warga.

Setelah dari Komnas HAM pengurus FKPPS yang didampingi KPA mendatangi Kompolnas untuk memberitahukan bahwa polisi telah menjadi penjaga kepentingan PTPN IX dengan mengorbankan masyarakat. Tujuan utama petani Sragen mendatangi kedua lembaga Negara ini adalah mencari keadilan atas konflik agraria dan mendorong mereka agar menyurati POLRI untuk menarik polisi yang terlibat di lapangan. AGP

Putusan Sidang PN Sragen:
Bentuk Kriminalisasi Pejuang Agraria

Sejak 22 Maret 2014 PTPN IX, Polres Sragen, dan preman terus melakukan upaya untuk mengkriminalisasi pejuang agraria yang ada di Sambirejo, Kabupaten Sragen. Polisi menangkap tiga orang yang merupakan tokoh masyarakat dan pejuang agrarian di Sambirejo, mereka adalah Sunarji, Sarjimin dan Suparno. Mereka dituduh telah melakukan pengrusakan terhadap fasilitas milik perkebunan PTPN IX dan atas tuduhan ini ketiga orang tersebut ditahan di Polda Jawa Tengah.

Penangkapan ini terjadi setelah Pemda Sragen melakukan mediasi pada 18 Maret 2014. Mediasi yang dihadiri oleh warga Sambirejo, DanDim, Kapolres, Sekda, Asisten I Sekda, Yonif 408, Sub. Denpom, Kantor Pertanahan Sragen, Kabag Hukum Kesbangpolinmas dan Direksi PTPN IX Semarang bertujuan untuk mencari jalan ke luar atas kasus agraria di Sambirejo. Namun ini hanya bagian untuk menjebak petani Sambirejo yang tergabung dalam Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan (FPKKS) karena setelah mediasi berlangsung pihak PTPN IX mengerahkan 5.000 lebih karyawannya untuk melakukan pendudukan lahan, yang selama ini telah dikuasai dan digarap warga. Atas tindakan yang dilakukan oleh pihak PTPN IX ini, maka kemudian terjadilah kericuhan antara warga dengan keamanan perkebunan. Saat kerusuhan semakin membesar maka Sdr. Sunarji dkk datang untuk melerai kedua belah pihak agar tidak jatuh korban.

Pada 22 Maret 2014 Polres Sragen memangil beberapa warga, yaitu Sunarji, Sarjimin dan Suparno untuk dimintai keterangan mengenai kericuhan yang terjadi antara warga dan karyawan PTPN IX dan sekaligus menetapkan mereka sebagai tersangka. Ketiganya harus berhadapan dengan hukum dan dikenai pasal 351 tentang penganiayaan dan pasal 170 ayat 2. Walau mereka tidak melakukan seperti yang dituduhkan, tetap saja PN Sragen memutuskan bahwa ketiga orang tersebut bersalah. Putusan PN Sragen tanggal 18 Agustus 2014 ini, membuat ketiga orang tersebut harus menjalani hukuman 1,5 tahun kurungan.

Berdasarkan kronologisnya, PTPN IX telah berusaha untuk memperluas lahan perkebunannya dengan cara menyewa tanah warga sejak pertengahan 1960 namun tidak pernah berhasil. Warga yang memiliki tanah seluas 446 ha berdasarkan SK No.2971X1172/DC/64 dan 3891z/173/72/DC164 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Daerah Jawa Tengah (KINAD) pada 4 Januari 1964, tidak pernah memberikan tanah tersebut untuk disewa oleh PTPN IX. Namun meletusnya peristiwa Gestok 1965 dimanfaatkan oleh pihak PTPN IX dengan menyebarkan isu bahwa semua warga yang mempertahankan tanahnya adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Tanah yang dikuasai oleh warga dengan mudah dirampas oleh PTPN IX dan mengganti semua tanaman menjadi tanaman karet. Sampai sekarang korban penggusuran yang terjadi sejak 1965 lalu masih menumpang di rumah keluarga dan kerabat lainnya.

Atas vonis yang dikeluarkan oleh PN Sragen tanggal 18 Agustus 2014 terhadap ketiga pejuang agraria Sambirejo maka Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan sikap:

1. Menolak Putusan PN Sragen yang menjatuhkan hukuman 1,5 tahun kepada Sunarji, Sarjimin dan Suparno. Putusan PN Sragen merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pejuang agraria karena hanya mencari-cari kesalahan mereka. Sementara itu PN Sragen tidak melakukan penyelidikan terhadap PTPN IX yang melakukan pendudukan lahan dengan menurunkan buruh perkebunannya sebanyak 5.000 orang.
2. Menuntut semua pihak khususnya aparat kepolisian untuk menghentikan: cara-cara kekerasan dan tindakan represif terhadap warga; keterlibatan kepolisian dalam proses penanganan konflik agraria di Sambirejo; serta upaya-upaya kriminalisasi aparat atas perjuangan petani Sambirejo.
3. Menuntut BPN untuk mencabut HGU PTPN IX di Sambirejo, yang berdiri di atas proses-proses kekerasan, perampasan tanah rakyat serta penyingkiran warga atas sumber-sumber penghidupan lainnya.
4. Segera jalankan reforma agraria sejati dengan membentuk badan khusus reforma agraria yang menangani penyelesaian konflik agraria, melakukan redistribusi tanah, mencegah potensi konflik agraria yang terjadi dikemudian hari.

Jakarta, 18 Agustus 2014

Konsorsium Pembaruan Agraria



Dialog Kerakyatan Subang:
Kekuatan Rakyat Harus Dongkrak Reforma Agraria



[Dialog kerakyatan Subang di aula DPRD Subang]

KPA/Jabar: Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno sekaligus mencari solusi atas krisis kepemimpinan menjelang Pilpres 2014, GMNI Subang menyelenggarakan dialog kerakyatan bersama berbagai elemen organisasi rakyat (5/7/2014). Bertempat di aula utama DPRD Subang, agenda ini dihadiri oleh Konsorsium Pembaruan Agraria, KASBI dan Presidium GMNI sebagai narasumber. Lebih dari 200-an orang berkumpul dari berbagai kalangan yaitu, petani, buruh, mahasiswa, anak jalanan dan pelajar.

Topik dialog kerakyatan ini membahas peran pemerintah, petani, buruh, pemuda dan mahasiswa dalam menentukan Pemimpin Nasional yang mampu mengembalikan jati diri bangsa. Galih Andreanto, Kepala Departemen Kampanye dan Kajian KPA yang hadir dalam kesempatan tersebut menuturkan bahwa tantangan bangsa Indonesia ke depan di bidang agraria cukup berat dan kompleks. Politik Agraria Nasional pasca 2014 diprediksi akan semakin liberal, terlebih dengan berlakunya MP3EI hingga 2025 serta asingisasi sektor pertanian yang semakin lebar. Konflik agraria akan mengalami letusan di beberapa titik karena akumulasi kesalahan arah politik agraria nasional oleh rezim SBY-Boediono.

"Karawang dan Subang misalnya, kita dapat melihat kenyataan bahwa kaum tani mengalami penindasan yang berlipat-ganda, yaitu dari kebijakan pemerintah dan ketidakberpihakan alat-alat negara terhadap para petani serta masifnya investasi infrastruktur di kawasan ini yang menggusur para petani dari tanahnya," jelas Galih.

Galih menjelaskan juga kenyataan bahwa konflik agraria yang meletus di Karawang sebagai buah dari palu hakim ketua PN Karawang yang memutuskan eksekusi lahan di atas tanah 350 Ha di Telukjambe Barat, Karawang. Ini tentu akan berkaitan dengan Subang yang akan dijadikan daerah ekspansi perluasan investasi properti dan industri. "Maka logis bila di Subang telah ada kawasan ekonomi khusus yang menggusur lahan pertanian dan meminggirkan para petani," jelas Galih.



[Galih Andreanto Kepala Dept.Kampanye dan Kajian KPA]

"Maka saya himbau untuk para petani di Subang untuk segera mengkonsolidasikan kekuatan untuk melawan rencana perampasan tanah besar-besaran oleh beberapa perusahaan asing di Subang," tegas Galih. Mengenai agenda reforma agraria pemimpin baru, Galih memaparkan bahwa reforma agraria sejati tetap harus didongkrak oleh kekuatan rakyat yaitu petani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan mahasiswa. "Jika dilihat dari visi-misi resmi kedua Capres tetap ada kontradiksi di dalam teksnya, terlebih kenyataan bahwa 'bom waktu' liberalisasi agraria akan penuh di era pasca 2014. Maka tak bisa kita menggantungkan perjuangan reforma agraria dari dinamika politik yang ada, tetaplah berpegang pada kekuatan riil rakyat yang berjuang," tutup Galih.

Konsolidasi Persiapan Hari Tani Nasional: Gerakan Agraria Siap Kepung Istana



[Konsolidasi menjelang hari tani 2014 di Seknas KPA]

2014 sebagai tahun yang dianggap penting tidak hanya bagi pemerintah Indonesia tapi juga bagi berbagai elemen yang ada dalam Indonesia. Agraria sebagai salah satu elemen penting juga ikut terimbas dengan adanya pergantian kepemimpinan, oleh karena itu para penggiat agraria turut mengambil peran untuk mencari peluang-peluang agar perjuangan yang telah dilakukan selama berpuluh tahun dapat terlaksana.

Hari Tani Nasional tahun ini yang berdekatan dengan momen-momen penting pergantian kepemimpinan dianggap sebagai sebuah peluang. Kesempatan yang dapat diisi dan digunakan untuk menunjukan eksistensi gerakan tani dan mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan reforma agraria sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan.

Menyambut peluang tersebut KPA bersama segenap organisasi tani, buruh, dan hukum mengadakan rapat konsolidasi bertempat di Sekretariat KPA, Jl. Pancoran Indah 1, Jakarta Selatan. Rapat yang dihadiri oleh sejumlah organisasi seperti AGRA, SP, Pusaka, Elsam, YLBHI, FPBI, JKPP, SMI, FMN, Formasi, STKS, KPOP, KPRI, IGJ, API, dan organisasi lainnya ini bertujuan menyatukan pandangan dan saran untuk aksi yang akan dilakukan pada Hari Tani Nasional.

Konferensi Nasional Reforma Agraria: Konsolidasi Masyarakat Sipil Perjuangkan Reforma Agraria

Dalam tahun politik kali ini sejumlah masyarakat sipil melakukan evaluasi tehadap kegagalan SBY dalam melaksanakan reforma agraria. Mereka menilai ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatnya konflik agraria disebabkan oleh keengganan SBY melaksanakan reforma agraria sejati.

Untuk itu 33 lembaga yang terdiri dari masyarakat sipil dan ormas tani bergabung untuk membentuk satu Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA). Ada tiga tujuan dari KNRA yaitu, pertama mengkonsolidasikan dan memperkuat gagasan mengenai pentingnya pelaksanaan reforma agraria dan pembaruan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia; kedua merumuskan substansi komprehensif dan aplikatif mengenai bagaimana mekanisme dan kelembagaan pelaksana reforma agraria dikembangkan di seluruh sektor; mengajukan konsepsi dan strategi operasional pelaksanaan reforma agraria kepada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden RI hasil Pemilu 2014.

Agenda utama KNRA adalah untuk mendesak pemimpin yang baru agar segera menjalankan reforma agraria sesuai dengan UUPA 1960 dan menjabarkan kondisi reforma agraria serta pelaksanannya di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri sampai sekarang masih banyak kelompok yang tidak meninginkan agenda reforma terjadi di Indonesia. Hal inilah yang mempelopori lahirnya posisi KNRA, untuk mencegah multi tafsir dari kelompok yang anti dengan agenda reforma agraria.

Tema dari KNRA adalah "Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa". Artinya reforma agraria menjadi agenda untuk merombak struktur kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah serta kekayaan alam sehingga tercipta keadilan agraria. Sedangkan kemandirian bangsa merupakan cita-cita nasional yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), tidak tergantung pada investasi maupun produk luar negeri, memiliki produktivitas tinggi, dan rakyatnya segera menikmati keadilan, kemakmuran dan kesejahteraannya secara merata.

Gagasan awal KNRA dilaksanakan pada 6 Agustus 2014 yang dipelopori oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Sayogyo Institute (Sains). Pertemuan awal yang berlangsung di KPA membahas pembentukan panitia yang terdiri dari SC dan OC, penetapan topik yang berkaitan dengan reforma agraria, agenda FGD, agenda workshop dan waktu konferensi.



[Rapat OC KNRA di Seknas KPA]

Adapun anggotanya adalah sebagai berikut: Sajogyo Institute (SAINS), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perhimpunan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMA), Epistema, Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Aliansi Petani Indonesia (API), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sawit Watch, Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria (FIKA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Solidaritas Perempuan (SP), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Anti Utang (KAU), Institute for Research and Empowerment (IRE), Lingkar Pembaruan Pedesaan dan Agraria (KARSA), Perkumpulan Prakarsa (PRAKARSA), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Indonesia Corruption Watch (ICW), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Farmer Initiatif for Ecological Lifelihood and Democration (FIELD), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) .AGP

PT. Rotorejo Kruwuk Sewa Preman Untuk Serang Petani



Konflik agraria kembali terjadi di Desa Gadungan dan Desa Sumberagun Blitar, Jawa Timur. Petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Kelud Makmur berkonflik dengan PT Rotorejo Kruwuk. Konflik terjadi pada saat PT Roterejo Keruwuk melarang petani menggarap lahan garapannya. Faktanya, HGU perusahaan seluas 557 ha habis pada 31 Desember 2009 dan petani telah menguasai lahan ex perkebunan secara fisik.

Sebelum konflik ini meletus, BPN Jawa Timur melakukan mediasi pada Mei 2014. Mediasi yang dihadiri oleh petani, PT Rotorejo Kruwuk dan Kepala BPN Provinsi Jawa Timur menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak menggunakan metode penyelesaian sengketa berbagi luas lahan garapan. Metode ini pun dinamakan sebagai sekenario "menang – menang"yang mengkesampingkan alas hukum hak pengelolaan maupun kepemilikan. Akhirnya disepakati petani memperoleh luas lahan garapan berkisar 24-350 Ha.

Baik petani maupun PT Rotorejo Krowuk tidak boleh menggarap di luar patok yang telah ditetapkan. Namun 19 Agustus 2014, pihak PT. Rotorejo Kruwuk melanggar kesepakatan dengan merusak tanaman petani berupa 2.000 pohon pisang dan mencabut 300 bibit kelapa. Pihak perusahaan memerintahkan bapak Syafi'I untuk memimpin anggotnanya yang berjumlah 30 orang untuk melakukan pengrusakan. Untuk membantu pekerjaan bapak Syafi'I, merusak tanaman petani maka pihak perusahaan menyewa jasa preman.

Paguyuban Petani Kelud Makmur yang merupakan anggota Paguyaban Petani Aryo Blitar (PPAB) tidak membalas tindakan perusahaan dengan kekerasan, tetapi membuka dialog untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Dialog yang dihadiri oleh PT. Rotorejo Kruwuk, Komandan Rayon Militer Gandusari (DANRAMIL), Komandan Kepolisian Sektor Gandusari (DANSEK), bapak Kepala Desa Gadungan dan Kepala Dusun Sukomulyo berubah menjadi perdebatan. Pihak perusahaan merasa bahwa tindakan yang merusak tanaman petani adalah bagian dari pembersihan di areal perusahaan. Petani yang mendengar pernyataan perusahaan tersebut terpancing emosinya karena pengerusakan tersebut berada di dalam patok milik petani.

Sampai saat ini pihak PT Rotorejo Kruwuk masih melakukan intimidasi terhadap petani Paguyuban Petani Kelud Makmur. Bahkan kondisi terakhir perusahaan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan PN Blitar melakukan kriminalisasi terhadap dua petani Siswaji dan Maseno. Mereka berdua dituduh telah melakukan pendudukan lahan milik PT Rotorejo Kruwuk dan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas di dalamnya.AGP

Bappenas Evaluasi Pemanfaatan Lahan Pertanian Untuk Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan



Dalam rangka mengevaluasi jalannya optimalisasi penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan lahan pertanian, Bappenas menyelenggarakan diskusi mengenai hal tersebut di Jakarta 20 Agustus 2014 lalu. Hasil dari evaluasi ini akan digunakan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dalam agenda Reforma Agraria.

Bappenas meminta beberapa praktisi dan pakar agraria untuk terlibat dalam prsoes evaluasi ini. Dalam agenda ini Bappenas mengundang Dewi Kartika (Wakil Sekjend KPA), Noer Fauzi Rahman (Direktur SAINS) dan Sapei Rusin (Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia).

Ada beberapa point-point yang berkembang dalam diskusi tersebut, antara lain: tujuan; ruang lingkup dan metodologi evaluasi; tiga pokok persoalan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia; rancang-bangun Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) serta capaian dan dampak dari program.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memeriksa rancangan konsep, kebijakan, perundang-undangan, kelembagaan, desain, dan pembiayaan program redistribusi tanah untuk meningkatkan akses penduduk miskin atas lahan. Tujuan kedua adalah untuk menemukan contoh-contoh di lapangan, bagaimana skema redistribusi tanah itu bekerja dan berpengaruh pada pengurangan kemiskinan. Selain itu, agenda ini bertujuan memberikan rekomendasi yang layak diusulkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Para undangan memberikan rekomendasi dengan tema Pro-Poor Agrarian Reform atas dasar analisis awal terhadap implementasi PPAN. Ketiga orang tersebut menyebutkan, perlunya "empat kaki" utama untuk mendorong rekomendasi. "Empat kaki" utama tersebut antara lain: organisasi-organisasi rakyat miskin pedesaan yang otonom; digalangnya koalisi politik yang luas dan pro-reforma agraria; disalurkannya investasi publik, kredit pemerintah, asistensi teknis yang besar, dan dijalankannya strategi pembangunan pro-poor yang berorientasi pertumbuhan dengan pemerataan (growth with equity).

Evaluasi ini disusun untuk menjadi acuan FGD di tingkat nasional. Bahan evaluasai ini berasal dari tiga daerah yaitu Blitar, Cilacap, Ciamis. Tiga wilayah yang akan menjadi prioritas adalah Banyumas, Sanggau dan Mesuji. FGD yang bertujuan untuk mempercepat reforma agraria akan melibatkan Kantor Pertanahan, dinas terkait dan organisasi rakyat yang ada di daerah.CR.

Dari Festival Film Douarnenez - Perancis:

"Debat Reforma Agraria di Indonesia"



[Dewi Kartika, Wakil Sekretaris Jenderal KPA menjelaskan kepada publik festival tentang reforma agraria dan dampak perampasan tanah skala besardi Indonesia]

Sejak dibukanya kran kerja sama internasional, mau tidak mau Indonesia sudah dipengaruhi oleh negara-negara lain. Disahkannya UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi pintu awal terbukanya liberalisasi di Indonesia. Undang-undang ini kemudian menjadikan para investor asing dan perusahaan asing berkembang dengan pesat menguasai pasar dan produksi Indonesia.

Kemudian pada tahun 2007 UU ini direvisi menjadi UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Meski telah berganti nama bukan berarti masalah penanaman modal asing selesai, justru semakin berkembang pesat. Kita memang tidak bisa serta-merta menutup semua perusahaan asing yang beroperasi di negeri ini. Namun selain mendorong perubahan politik agraria lewat kerja-kerja advokasi utamanya di tingkat nasional, upaya membangun kesadaran publik secara global pun menjadi satu kebutuhan untuk terus mendesakan dan mengkampanyekan masalah agraria yang berkembang di Indonesia sebagai akibat dari kebijakan liberalisasi sumber-sumber agraria.

Bretagne atau Brittania, salah satu region di Perancis, mengadakan sebuah perhelatan tahunan yang berlangsung dari 22–30 Agustus 2014. Tepatnya di Kota Douarnenez, telah dilangsungkan Festival de Cinema Douarnenez atau Festival Film Douarnenez. Festival ini cukup dikenal oleh masyarakat Perancis dan sekitarnya (Eropa), terutama di kalangan pembuat dan penikmat film independen. Menariknya, perayaan festival edisi ke-37 kali ini mengambil tema "Indonesia". Tema ini mengangkat juga isu Timor Leste dan Papua.

Warga Prancis konon dikenal dengan "hobinya" menonton film. Apresiasi mereka terhadap film independen dapat terlihat di bioskop-bioskop yang tidak hanya memutar film komersil, tetapi juga memutar film independen. Untuk dapat menikmati film independen, selama festival orang rela antri membeli tiket dan membayar dengan harga tiket setara dengan harga film komersil.

Film-film seperti Daun di Atas Bantal dan Opera Jawa karya Garin Nugroho, Eliana Eliana karya Riri Reza, Playing Between Elephants karya Aryo Danusiri, hingga film seperti 40 Years of Silence an Indonesian Tragedy karya Robert Lemelson dan the Act of Killing dari Joshua Oppenheimer diputar dan dipublikasikan selama festival. Selain dari sisi cinematografi memiliki kualitas yang baik, film-film yang diputar dianggap kuat dari sisi muatan cerita, nilai-nilai kemanusian dan sosial yang diangkat. Festival ini dihadiri oleh para sutradara, film-maker, praktisi seni dari Indonesia dan negara-negara Eropa. Uniknya, festival Douarnenez turut dihadiri oleh para aktivis gerakan sosial dari berbagai bidang dan negara.

Debat La Reforma Agraire en Indonesia: Quells Enjeux?, adalah sebuah acara debat yang dilaksanakan dalam festival ini. Debat ini secara khusus mengangkat tema reforma agraria dengan isu pokok, bagaimana gerakan reforma agraria lahir di Indonesia dan mengapa Indonesia perlu menjalankan reforma agraria. Dewi Kartika, Wakil Sekretaris Jenderal KPA diundang dan didaulat menjadi panelis utama untuk menjelaskan kepada publik festival tentang reforma agraria dan dampak perampasan tanah skala besar di Indonesia.

Lalu, apa yang penting dipahami oleh warga Perancis tentang gerakan reforma agraria di Indonesia? Dan kaitannya dengan ekonomi pasar global yang mempengaruhi situasi agraria di negara-negara berkembang seperti Indonesia? Hadir pula Tamara Soukotta, akademisi dari International Social Study (ISS)– Belanda, Athim Issoufaly dari CCFD–Perancis, dan Gerad Alle dari Festival Committee, sebagai penanggap untuk memberikan persfektif ekonomi global, khususnya di Eropa, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kondisi agraria di negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Dalam pernyataannya, Dewi mengungkapkan bahwa ketimpangan struktur agraria di Indonesia semakin tajam antara para pemilik lahan skala luas yang dikuasai perusahaan perkebunan, baik perusahaan negara, swasta hingga asing, dengan para pemilik lahan sempit, yakni kelompok petani gurem bahkan kelompok tak bertanah. Aki-

batnya, mayoritas petani di Indonesia menjadi petani miskin karena kepemilikan lahan yang terlampau kecil, bahkan jumlah petani tak bertanah yang tidak mempunyai akses sama sekali terhadap lahan semakin banyak jumlahnya.

Para petani tak bertanah itu, kebanyakan berakhir menjadi buruh tani di perkebunan-perkebunan besar (negara/swasta), termasuk perkebunan kelapa sawit yang ekspansinya semakin meluas di Indonesia. Para petani miskin dan keluarganya itu, tak jarang terlempar dari sektor pertanian ke sektor-sektor industri sebagai buruh pabrik di kota-kota dengan upah rendah, atau sektor informal sebagai pekerja rumah tangga, hingga mengadu nasib ke luar negeri sebagai TKI. Sektor pertanian berbasis rumah tangga petani tidak lagi dianggap menjanjikan untuk kesejahteraan hidup keluarga petani. Ketimpangan agraria, kemiskinan di pedesaan dan sektor pertanian rakyat yang suram, diwarnai dengan terjadinya ploletarisasi, hilangnya profesi petani berganti menjadi buruh-buruh tani.

Reforma agraria adalah jalan untuk mengakhiri ketimpangan struktur agraria sehingga menjadi lebih berkeadilan bagi kelompok rentan, seperti petani miskin dan masyarakat adat. Reforma agraria juga diperlukan agar basis produksi ekonomi petani secara kolektif dapat dibangun dan diperkuat di desa-desa. Peran dan kesadaran masyarakat global di negara-negara maju, seperti Perancis sangat penting, mengingat praktek-praktek ekspansi, eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber agraria di Indonesia, banyak dilakukan dan didukung oleh pemodal asing yang berasal dari negara maju.

Masyarakat global, termasuk kalangan film dan seni sangatlah penting untuk dilibatkan dalam kegiatan kampanye dan pendidikan public yang ditujukan untuk membangun kesadaran publik. "Pola konsumsi masyarakat di negara maju, termasuk Perancis, terhadap berbagai produk pangan dan non-pangan tidak sedikit yang bersumber dari hasil praktek perampasan tanah di Negara-negara miskin dan berkembang. Saatnya masyarakat global turut mendukung gerakan reforma agraria dengan menolak barang-barang hasil produksi perusahaan-perusahaan, yang terbukti berkontribusi terhadap hilangnya akses petani dan masyarakat adat atas tanah, hutan dan sungainya yang menjadi sumber penghidupan, dan berakhir dalam situasi konflik agraria berkepanjangan," demikian ungkap Dewi dalam debat yang berlangsung sekitar dua jam itu. (YD)

Dianto Bachriadi:
Konsisten Memperjuangkan Reforma Agraria



Dianto Bachriadi merupakan seorang antropolog yang memilih jalur sepi untuk memperjuangkan reforma agraria. Sebelum lulus pada 1986 dari antropolgi, Fisip UNPAD, dia telah aktif dalam advokasi sengketa tanah di Indonesia. Setelah lulus dia tetap konsisten dalam jalur agraria dan pada 1999-2001 dipercaya untuk menjadi ketua Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Prestasi yang pernah dia capai adalah mendorong lahirnya TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Diskusi, kajian dan berbagai aksi dia lakukan untuk mendesak MPR mensahkan TAP MPR No.IX/2001. Sampai saat ini TAP MPR No.IX/2001 menjadi alas hukum bagi kelompok aktivis agraria untuk mendesak pemerintah agar menjalankan reforma agraria sejati.

Dianto bachriadi yang sering disapa dengan 'Gepenk' lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada 12 September 1965. Sepanjang hidupnya dia telah banyak mengeluarkan karya dalam bentuk buku seperti "Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital (Bandung:Akatiga, 1965), "Merana di Tengah Kelimpahan: Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia (Elsam, 1998), penelitian bersama Anton Lucas, dosen senior di Department of Asian Studies and Languages, berjudul: "Merampas Tanah Rakyat, Kasus Tapos dan Cimacan.

Adapun buku dan artikel yang berbahasa Inggris adalah buku A Long Wait That Is Not Yet Over (Ohio University Press:USA, 2012), sedangkan artikelnya Is Contentious Politics Relevant In Liberal Democracy? A Perspective (Kasarinlan:Philippine Journal of third World Studies 23 (1):139-145), Fighting for Land, Post Agrarian Reform in Indonesia, Six Decades of Inequality: Land T Releenure Problems in Indonesia.

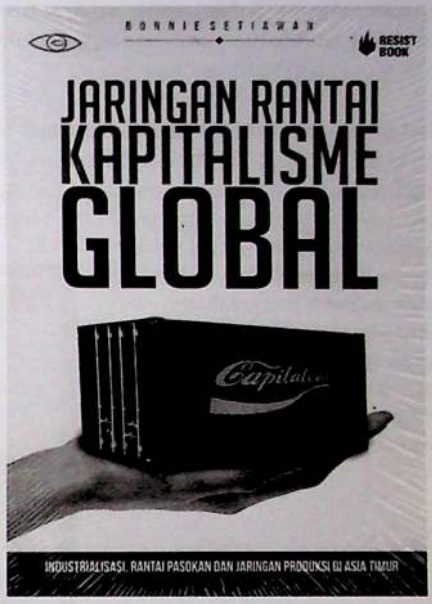


[Dianto Bachriadi bersama Komisioner KOMNAS HAM lainya saat menerima pengaduan dari rakyat]

Karir politiknya terbilang cemerlang karena berhasil menjadi wakil ketua KOMNAS HAM bidang eksternal priode 2013-2014. Sebelumnya pada 2002-2004 menjadi anggota tim ad hoc Komnas HAM yang mendorong terbentuknya Komite Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA). Namun dorongan untuk terbentuknya KNuPKA belum berhasil.

Dalam dunia akademik dia melanjutkan kuliahnya di Universitas Flinders dan meraih gelar Ph.D. Semasa kuliah dia mengambil jurusan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Saat ini dia masih menjabat sebagai komisioner Komnas HAM yang berakhir pada 2017 dan Direktur di Agrarian Resource Center (ARC).AGP

Jaringan Rantai Kapitalisme Global: Canggihnya Kerja Kapitalisme



Judul: Jaringan Rantai Kapitalisme Global
Penulis: Bonnie Setiawan
Penerbit: Resist Book
Tebal: 300 Halaman
Harga:

Pada era sekarang sudah sangat banyak buku yang membahas kapitalisme dan sistem penghisapannya, akan tetapi sangat jarang yang membahas tentang sistem jaringan kerja kapitalisme. Bonnie Setiawan adalah salah satu orang yang sangat fokus membahas cara kerja kapitalisme modern. Buku "Jaringan Rantai Kapitalisme Global" merupakan bukunya yang menjelaskan tentang cara kerja kapitalisme di abad 21.

Bab II menceritakan tentang bagaimana terbentuknya perdagangan melalui kebijakan negara mengenai industri, rantai pasokan dan jariangan produksi. Di Bab III menceritakan kerberhasilan Asia Timur dalam mengembangkan industri khususnya China dan Jepang. Kerberhasilan ini tidak terlepas dari intervensi negara-negara tersebut untuk mengembangkan industri dalam negeri dengan mengelola kekayaan alamnya secara berdaulat. Bab IV menjelaskan tentang tidak berkembangnya industri negara-negara Asia Tenggara dikarenakan tergantung kepada Investasi asing. Contohnya terjadi pada negara Thailand, Filipina dan Indonesia yang mengalami stagnasi pada industri dalam negerinya karena membuka pintu pasar bebas dan hilangnya peran negara. Pada Bab terakhir buku ini memberikan satu model untuk membangun industri nasional, seperti yang dilakukan oleh China dan Jepang.

Buku ini memberikan pandangan tentang betapa pentingnya peran negara dalam mengejar negara industri maju. Secara lebih mendalam lagi, buku ini memberikan pandangan bahwa konsep pasar bebas dan menghilangkan peran negara ternyata telah ga-

gal untuk memajukan suatu negara. Buku ini mengingatkan kita bahwa Negara harus melakukan intervensi terhadap perkembangan industri sehingga rakyatnya bisa bersaing di era globalisasi saat ini.

Buku ini juga memberikan informasi kepada kita tentang perkembangan-perkembangan ekonomi global yang paling dinamis, seperti Jepang, Tiongkok, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Terdapat ulasan mengenai sejarah masyarakat dan industri, kegagalan industrialisasi, hingga perkembangan rantai pasokan dari negara-negara tersebut. Secara keseluruhan buku ini sangat baik untuk menambah pengetahuan kita tentang kapitalisme global yang sedang berkerja saat ini. Semoga pembaca bisa semakin memahami gerak kapitalisme di abad 21 ini.AGP/CRL

